



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

# RENCANA KERJA TAHUNAN 2021



# RENCANA KERJA TAHUNAN **2021**

---

## **TIM PENYUSUN**

---



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

### **PELINDUNG**

**Prof. Ir Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., IPU**  
(Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi)

### **PENGARAH**

- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

### **PENANGGUNG JAWAB**

**Diyan Wahyudi, ST, ME**  
(Koordinator Bagian Rencana dan Laporan)

### **Editor**

**Dr. Aldi Martino Hutagalung, ST., MT**  
(Sub Koordinator Bagian Penyiapan Rencana dan Program)

### **Tim Penyusun**

Gofar, Tri Sudharma, Diete Patik, Sarah Alsa, Koesnobroto,  
Mochamad Imron, Wahyunengsih, Elda Fitri Hasari, Alfin Ali



# SAMBUTAN

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahap keempat dari RPJPN 2005-2025 dengan tema pembangunan: Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkelinjambungan. Dalam RPJMN 2020 -2024, program-program yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada pembangunan ekonomi yang dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Juga fokus infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Peran serta sub sektor migas dalam mencapai daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional dimana sub sektor migas merupakan penghasil devisa maupun sumber penerimaan negara. Diharapkan penerimaan Negara dari sub sektor migas dapat tercapai di tahun 2021.

Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Ditjen Migas menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 dengan menyeraskan Renstra 2020-2024 dengan arah kebijakan pada ketahanan migas berdasarkan konsep 4A+S (Availability, Acceisibility, affordability, Acceptability, dan Sustainability). Konsep tersebut diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) sehingga diharapkan pada tahun 2021 nanti, Ditjen Migas dapat merealisasikan Indikator Kinerja yang sudah disusun demi terwujudnya Ketahanan Migas.

Berdasarkan indikator kinerja tersebut, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 diantaranya:

1. Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan;
2. Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran;
3. Evaluasi Usulan Ruas Transmisi Trans Kalimantan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
4. Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi;
5. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
6. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran;
7. Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran
8. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas)
9. Draft Revisi Undang-Undang Migas

Akhir kata, kami berharap kepada semua pihak terkait untuk dapat bersatu padu mengembangkan sub sektor minyak dan gas bumi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan peran Kementerian ESDM untuk mewujudkan energi yang berkeadilan.

Jakarta, Januari 2021

  
**Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc, Ph.d., IPU**

# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
SAMBUTAN	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR BAGAN	7
<hr/>	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>8</b>
1.1 Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional	9
1.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	9
1.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	10
1.4 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021	11
1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Migas	12
<hr/>	
<b>BAB 2 EVALUASI KEGIATAN 2014-2019</b>	<b>14</b>
2.1 Lifting Minyak Dan Gas Bumi	15
2.2 Jumlah Penawaran Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi	16
2.3 Cadangan Minyak dan Gas Bumi	19
2.4 Pemanfaatan Gas Bumi dalam Negeri	22
2.5 Volume BBM Bersubsidi	25
2.6 Volume LPG Bersubsidi	26
2.7 Kapasitas Kilang BBM	27
2.8 Kapasitas terpasang Kilang LPG	28
2.9 Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga	29
2.10 Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas (Kerja Sama Pembangunan SPBG dengan NEDO)	31
2.11 Jumlah Realisasi Penerimaan Negara dari Subsektor Minyak dan Gas Bumi terhadap Target APBN	32
2.12 Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi	33
2.13 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Keteknikan yang Baik	34
2.14 Jumlah Perusahaan Hulu dan Hilir Migas yang Kegiatan Operasinya Tidak Terjadi Kecelakaan Fatal	35
<hr/>	
<b>BAB 3 ANGGARAN 2021</b>	<b>38</b>
<hr/>	
<b>BAB 4 RENCANA KERJA TAHUNAN 2021</b>	<b>44</b>
4.1 Indeks Ketersediaan Migas	46
4.2 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	48
4.3 Indeks Aksesibilitas Migas	49
4.4 Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	51
4.5 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	52

# RENCANA KERJA TAHUNAN **2021**

---

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

4.6	Persentase Realisasi PNBP Migas	52
4.7	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	54
4.8	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	55
4.9	Nilai SAKIP Ditjen Migas	56
4.10	Indeks Keselamatan Migas	57
4.11	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	58
4.12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	59
4.13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	60
4.14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	60
4.15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	61

---

<b>BAB 5 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) &amp; INDIKATOR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)</b>	<b>64</b>
5.1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	65
5.2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	70
5.3. INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)	74

---

<b>BAB. 6 RENCANA AKSI</b>	<b>100</b>
----------------------------	------------

---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arah Prioritas Kebijakan RPJPN 2005-2025	10
Gambar 2. Tema Pembangunan RKP tahun 2018-2020	11
Gambar 3. Peta Strategi Dltjen Migas 2020-2024	13
Gambar 4. Peta Distribusi Hidrokarbon Indonesia	18
Gambar 5. Rencana Pembangunan Jaringan Pipa yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu JIipe – Kabupaten Gresik	24
Gambar 6. Total Realisasi Pembangunan Jargas APBN Tahun 2019 : 74.496 SR (16 lokasi)	29

# DAFTAR ISI

## DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.	LIFTING MINYAK BUMI TAHUN 2014-2019	15
GRAFIK 2.	LIFTING GAS BUMI TAHUN 2014-2019	16
GRAFIK 3.	STATISTIK WK MIGAS KONVENTIONAL 2012-2019	16
GRAFIK 4.	JUMLAH KEGIATAN STUDI BERSAMA, PENAWARAN WK, DAN TANDATANGAN KKS	17
GRAFIK 5.	CADANGAN MINYAK BUMI INDONESIA	19
GRAFIK 6.	TARGET DAN REALISASI CADANGAN MINYAK BUMI	19
GRAFIK 7.	CADANGAN GAS BUMI INDONESIA	20
GRAFIK 8.	TARGET DAN REALISASI CADANGAN GAS BUMI INDONESIA	21
GRAFIK 9.	PERSENTASE ALOKASI GAS BUMI DOMESTIK	22
GRAFIK 10.	PEMANFAATAN GAS BUMI INDONESIA 2019	23
GRAFIK 11.	VOLUME TARGET DAN REALISASI BBM SUBSID 2015-2019	25
GRAFIK 12.	VOLUME TARGET DAN REALISASI LPG BERSUBSIDI 2015-2019	26
GRAFIK 13.	PRODUKSI BBM DARI KILANG DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019	27
GRAFIK 14.	KAPASITAS KILANG LPG PERIODE 2015-2019	28
GRAFIK 15.	REALISASI PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA APBN TA 2009-2019	31
GRAFIK 16.	TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA SEKTOR MIGAS 20145-2019	32
GRAFIK 17.	REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS TAHUN 2014 – 2019	33
GRAFIK 18.	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN KETEKNIKAN YANG BAIK 2015-2019	35
GRAFIK 19.	JUMLAH KECELAKAAN DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	35
GRAFIK 20.	JUMLAH PERUSAHAAN HULU MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN FATAL	36
GRAFIK 21.	JUMLAH PERUSAHAAN HILIR MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN FATAL	36
GRAFIK 22.	JUMLAH KECELAKAAN DALAM KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS	37
GRAFIK 23.	BELANJA ANGGARAN TA 2021	42

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.	REALISASI JENIS BBM TERTENTU (BBM SUBSIDI) TAHUN 2019	26
TABEL 2.	KAPASITAS KILANG BBM NASIONAL	28
TABEL 3.	PROGRES KEGIATAN JARGAS SAMPAI DENGAN AKHIR 2019	30
TABEL 4.	TANTANGAN DAN SOLUSI INVESTASI HULU DAN HILIR MIGAS	34
TABEL 5.	ALOKASI ANGGARAN 2021 UNTUK INFRASTRUKTUR	39
TABEL 6.	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) KEGIATAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI	40
TABEL 7.	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) KEGIATAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI	41
TABEL 8.	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) KEGIATAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KESEKRETARIATAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI	41
TABEL 9.	ALOKASI ANGGARAN MASING-MASING ESELON 2	42
TABEL 10.	ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL (PN) 2021	43
TABEL 11.	INDIKATOR KINERJA UTAMA DITjen MIGAS TAHUN 2021	45
TABEL 12.	INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS	65
TABEL 13.	AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN	66
TABEL 14.	INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS	67
TABEL 15.	PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	68
TABEL 16.	PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS	68
TABEL 17.	PERSENTASE REALISASI PNBP MIGAS	68

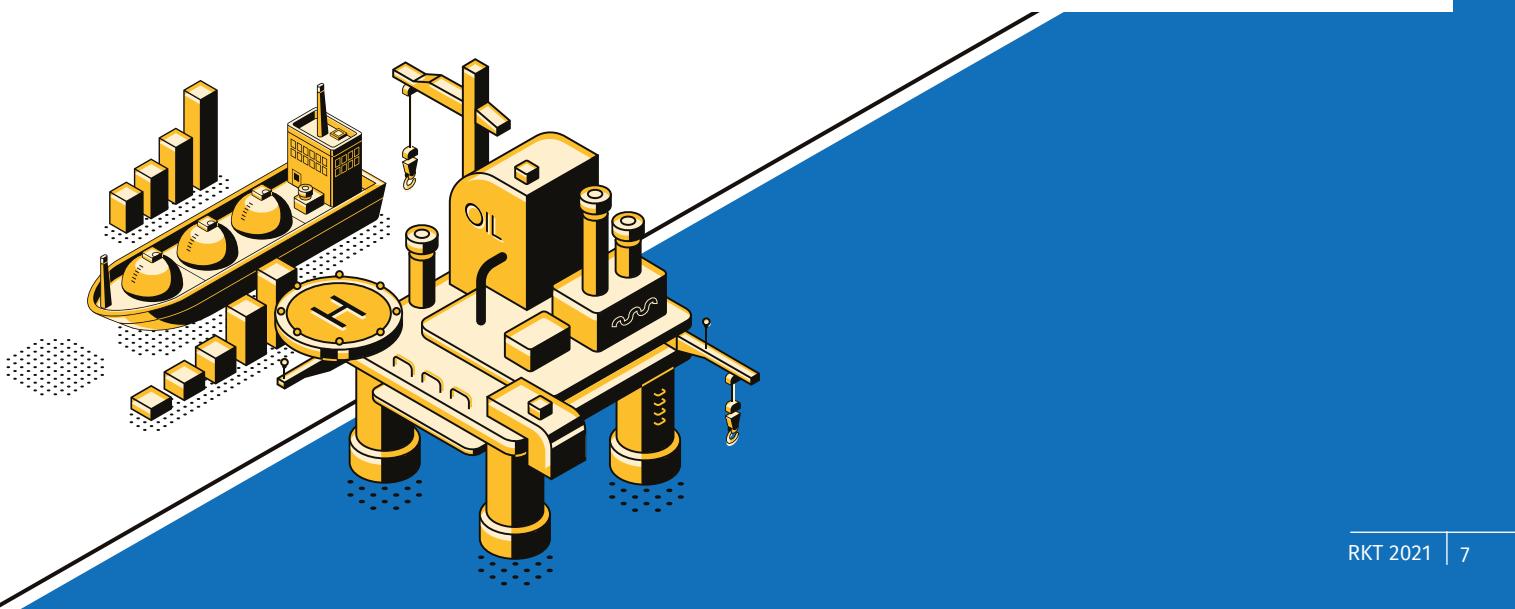
# RENCANA KERJA TAHUNAN **2021**

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

TABEL 18. INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS	69
TABEL 19. INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	69
TABEL 20. INDEKS KESELAMATAN MIGAS	69
TABEL 21. INDEKS REFORMASI BIROKRASI	69
TABEL 22. NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS	70
TABEL 23. INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS	70
TABEL 24. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	72
TABEL 25. INDEKS MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS	72
TABEL 26. NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) DITJEN MIGAS	73
TABEL 27. INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS	73
TABEL 28. INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO) PADA PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	74
TABEL 29. INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO) PADA PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN	89

## DAFTAR BAGAN

BAGAN 1. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS	47
BAGAN 2. INDIKATOR PENDUKUNG AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN	48
BAGAN 3. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS	50
BAGAN 4. PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	51
BAGAN 5. INDIKATOR PENDUKUNG PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS	52
BAGAN 6. INDIKATOR PENDUKUNG PERSENTASE REALISASI PNBP MIGAS	53
BAGAN 7. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	54
BAGAN 8. INDIKATOR PENDUKUNG TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS	55
BAGAN 9. INDIKATOR PENDUKUNG NILAI SAKIP DITJEN MIGAS	56
BAGAN 10. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	57
BAGAN 11. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS	58
BAGAN 12. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN MIGAS	59
BAGAN 13. INDIKATOR PENDUKUNG NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS	60
BAGAN 14. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS	62
BAGAN 15. INDIKATOR PENDUKUNG NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN MIGAS	63



# BAB I

## PENDAHULUAN



RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2021**

---

## ■ **1.1 TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

---

Tujuan pembangunan nasional telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lebih rinci lagi, akan tampak amanah yang diberikan Negara kepada para pemegang kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 didalamnya mengamanatkan sistem perencanaan yang mampu :

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

---

## ■ **1.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)**

---

Termasuk didalamnya tertuang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan dasar perencanaan pembangunan NKRI bahwa :

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwasasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,

dan

3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan atas umum penyelenggarakan negara.

Berdasarkan RPJPN 2005-2025 bahwa tantangan utama dalam penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi yang sekaligus memperbesar penerimaan devisa, memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan. Sedangkan visi pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah terwujudnya kemampuan bangsa dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan; untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

## ■ 1.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk wujudkan **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**. RPJPN 2005-2025 dituangkan ke dalam empat tahapan RPJMN. RPJMN Tahap I (2004-2009) dan tahap II (2010-2014)

telah ditetapkan dan dilaksanakan, RPJMN Tahap III (2015-2019) telah ditetapkan dan dilaksanakan. Sedangkan RPJMN Tahap IV (2021-2025) akan dilaksanakan sesuai dengan visi-misi program prioritas Presiden terpilih (2021-2025). Berikut rumusan arahan prioritas kebijakan RPJPN 2005-2025.



Gambar 1. Arah Prioritas Kebijakan RPJPN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2024 adalah tahap keempat dari RPJPN 2005-2025 dengan tema pembangunan: **Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan**. RPJMN 2021-2024 memiliki 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional) yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 7 agenda pembangunan tersebut adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Keserjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam RPJMN 2021-2024, program-program yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada agenda pembangunan ke-1 dan ke-5. Pada agenda pembangunan pertama, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan

merata. Sedangkan pada agenda pembangunan kelima bahwa Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah tersebut, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional pada level Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden tersebut yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Sejalan dengan itu, pada Undang-undang No.

17 Tahun 2007 disebutkan bahwa RPJM dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahannya dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan ABPN dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga.

## 1.4 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2021

RKP Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode I (satu) tahun, yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. "Mempercepat Pemulihian Ekonomi dan Reformasi Sosial" adalah tema yang ditetapkan dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 sebagai respon terhadap bencana pandemi COVID-19. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2021 masih difokuskan untuk menstimulasi dan menggerakkan sosial-ekonomi, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai pelaksanaan tahun kedua RPJMN 2020-2024, pelaksanaan RKP tahun 2021 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya.



Gambar 2. Tema pembangunan RKP tahun 2015-2018

Sesuai dengan visi pembangunan, "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", RKP 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2021 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan

ekspor. Sehingga program-program pembangunan akan ditujukan sesuai dengan tema pembangunan tersebut. Di tingkat Eselon I, untuk menjelaskan program yang tertera pada Renstra-KL diperlukan dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 yang merupakan penjabaran tahun pertama dalam RPJMN 2020-2024 dengan mempertimbangkan Visi dan Misi presiden serta evaluasi Pelaksanaan Renstra 2015-2019. RKT ini memuat narasi dan sasaran (uraian, indikator kinerja dan target) yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan.

## 1.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS

---

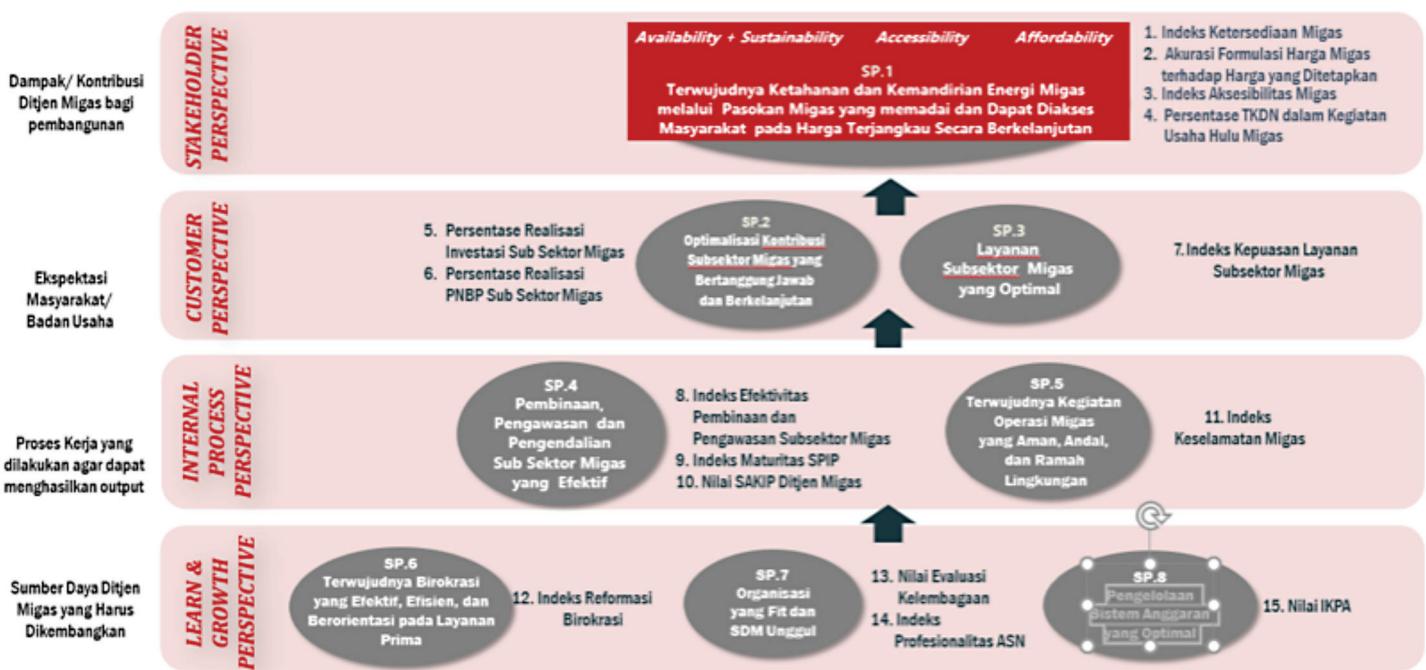
Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU yang berlaku sampai dengan saat ini adalah berdasarkan Permen ESDM No. 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM. Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Ditjen Migas untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu *balance scorecard* (BSC).

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja, yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus, dan mengelola strateginya. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan / organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan "sistemimbalan". BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi stratejik kepada seluruh tingkatan dlm organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu, yaitu:

keuangan, customer, internal process, learning and growth. Sedangkan untuk institusi pemerintah perspektif keuangan diganti dengan stakeholder perspektif.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis, yang menggambarkan hubungan kausal antar tujuan sebagai suatu kesatuan serta berfungsi sebagai merupakan peta Jalan (roadmap) agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas berpedoman pada PP 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energy dan ketahanan energy nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Ditjen Migas memiliki 5 sasaran program yang diintegrasikan dengan 4 perspektif BSC, yaitu:

1. Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga Terjangkau Secara Berkelanjutan
2. Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan
3. Layanan Subsektor Migas yang Optimal
4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif
5. Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan
6. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
7. Organisasi yang Fit dan SDM Unggul
8. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal



Gambar 3. Peta Strategi Dltjen Migas 2021-2024

Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu Program (*outcome*) dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Program. Capaian Sasaran Program akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program.

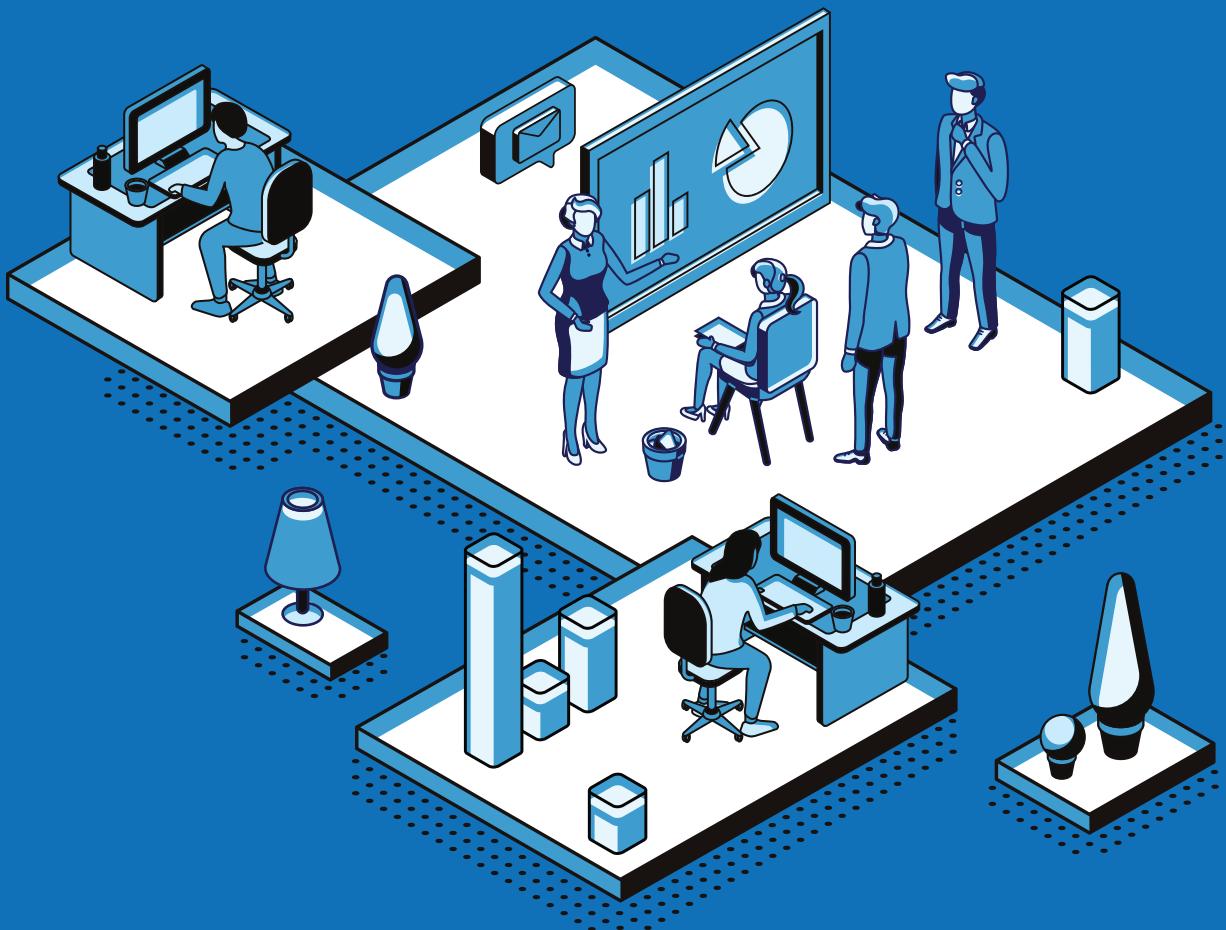
Mengacu pada World Energy Council (WEC) dan Asia Pacific Energy Research Centre (APERC), terdapat 5 indikator terwujudnya ketahanan energi, yaitu ketersediaan (*availability*), kemudahan

(*accessibility*), keterjangkauan (*affordability*), masyarakat (*acceptability*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Selain itu Renstra Ditjen Migas 2021-24 juga fokus pada penataan dan penguatan internal organisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, penataan peraturan perundangan, peningkatan kualitas layanan publik, yang terangkum dalam Reformasi Birokrasi (terdapat 8 area perubahan sesuai dengan Permen PAN RB 11/2015). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disusunlah sebuah konsep Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Renstra Ditjen Migas 2021-2024 yang terdiri dari 5 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Utama.

# BAB II

## EVALUASI KEGIATAN

2014-2019



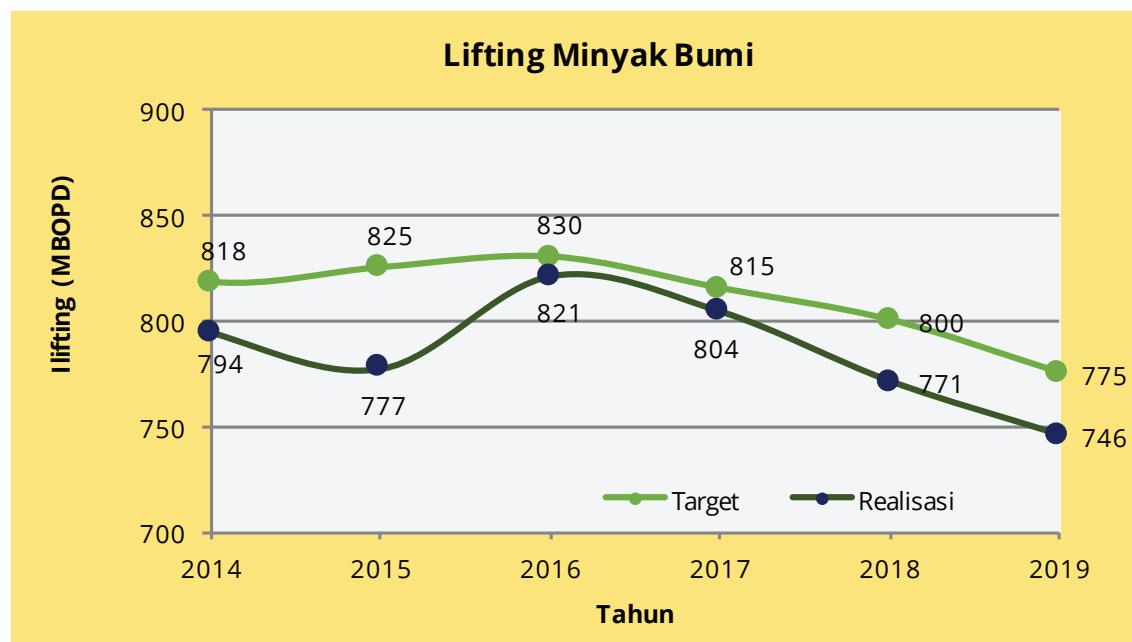
RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2021**

## 2.1 LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

### a. Lifting Minyak Bumi

Sebagaimana yang terlihat pada Grafik 1 perkembangan *lifting* minyak bumi dari tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2019 cenderung mengalami penurunan. Tercatat sampai dengan akhir semester 1 tahun 2019 realisasi lifting minyak bumi sebesar 745,61 Ribu BOPD dari angka yang di targetkan berdasarkan APBN 2019 sebesar 775 Ribu BOPD. Perubahan target lifting beberapa tahun ini bisa diakibatkan oleh perkembangan ekonomi

domestik dan global beserta proyeksi kedepan. Sedangkan penurunan *lifting* secara teknis karena produksi migas secara umum mengalami penurunan *performance reservoir* secara alami (*natural decline*) dan juga belum ditemukan cadangan minyak besar yang dapat menggantikan produksi minyak yang terus menurun beserta kendala teknis lainnya di sumur

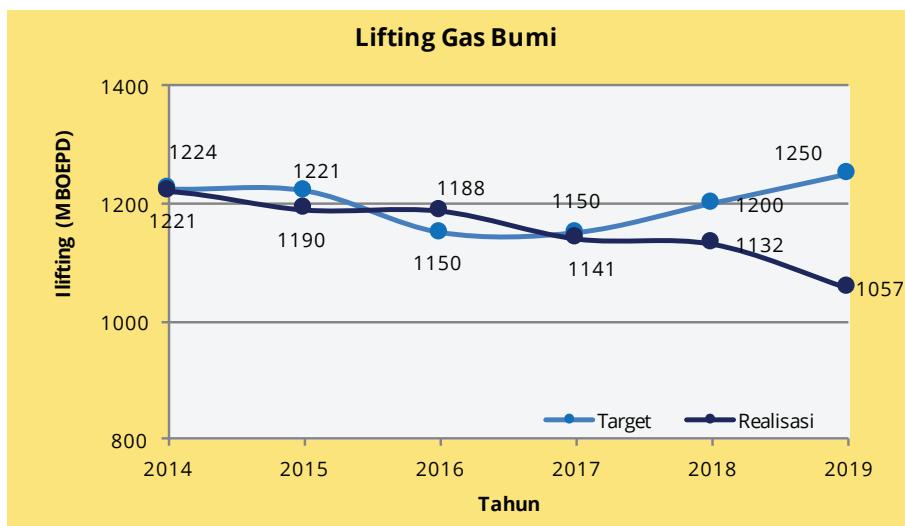


Grafik 1. Lifting Minyak Bumi Tahun 2014-2019

### b. Lifting Gas Bumi (MBOEPD)

Pada Grafik 2 berikut menunjukkan perkembangan besaran lifting gas bumi selama periode 6 tahun sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. Seperti halnya lifting minyak bumi, kecenderungan lifting gas bumi mengalami penurunan sampai dengan akhir tahun 2019. Data sampai dengan akhir semester 2 tahun 2019 menunjukkan realisasi lifting gas bumi sebesar 1.057 MBOEPD (capaian 85%) dari

target yang ditetapkan sesuai APBN 2019 sebesar 1.250 MBOEPD. Dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir realisasi lifting gas bumi mengalami penurunan karena minimnya penemuan cadangan baru untuk meningkatkan produksi migas beserta kendala teknis lainnya yang berkaitan dengan kondisi sumur beserta reservoirnya.



Grafik 2. Lifting Gas Bumi Tahun 2014-2019

## 2.2 JUMLAH PENAWARAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

### a. Wilayah Kerja (WK) Konvensional

Penandatanganan Wilayah Kerja Migas Konvensional melalui lelang wilayah kerja selama periode 2014-2016 mengalami kecenderungan trend yang menurun sebagaimana terlihat pada Grafik 3. Penurunan trend tersebut disebabkan oleh semakin terbatasnya prospektif area yang ditawarkan serta kecenderungan penurunan minat investasi perusahaan migas karena harga minyak mentah dunia dan faktor terms & conditions yang diberikan. Namun pada tahun 2017 penandatanganan Wilayah Kerja Migas Konvensional mulai mengalami kenaikan trend dengan mulai diterapkan sistem Kontrak Gross Split. Pada tahun 2019, Pemerintah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional dengan jumlah penawaran sebanyak 13 wilayah kerja yang keseluruhannya ditawarkan

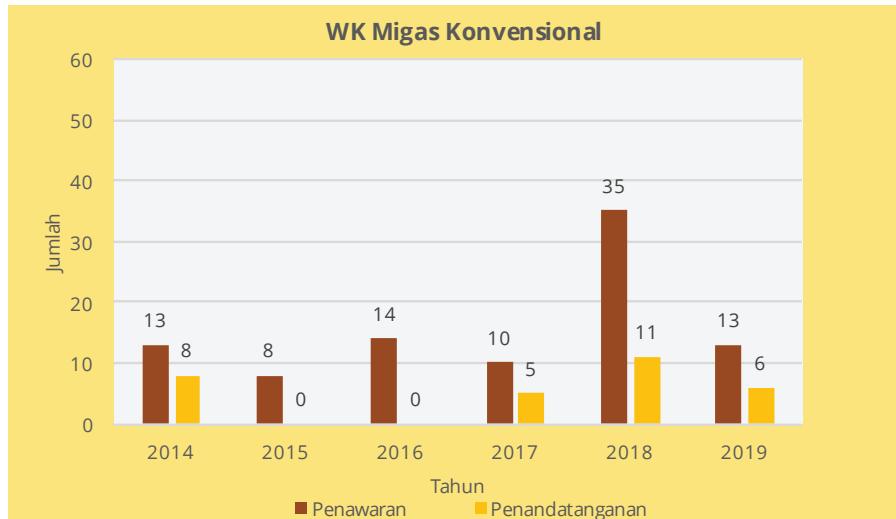
melalui Lelang Reguler yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu :

**Tahap 1 :** 5 WK yang terdiri dari WK Selat Panjang, West Kampar, Anambas, West Ganal, West Kaimana. Seluruh WK ini ditawarkan dengan mekanisme Kontrak PSC Gross Split

**Tahap 2 :** 4 WK yang terdiri dari WK West Kampar, Bone, Kutai, West Ganal

**Tahap 3 :** 4 WK yang terdiri dari WK East Gebang, West Tanjung I, Belyan I, Cenderawasih VIII.

Berikut grafik 3 menunjukkan perkembangan penawaran dan penandatanganan WK selama kurun waktu 6 tahun terakhir



Grafik 3. Statistik WK Migas Konvensional 2012-2019

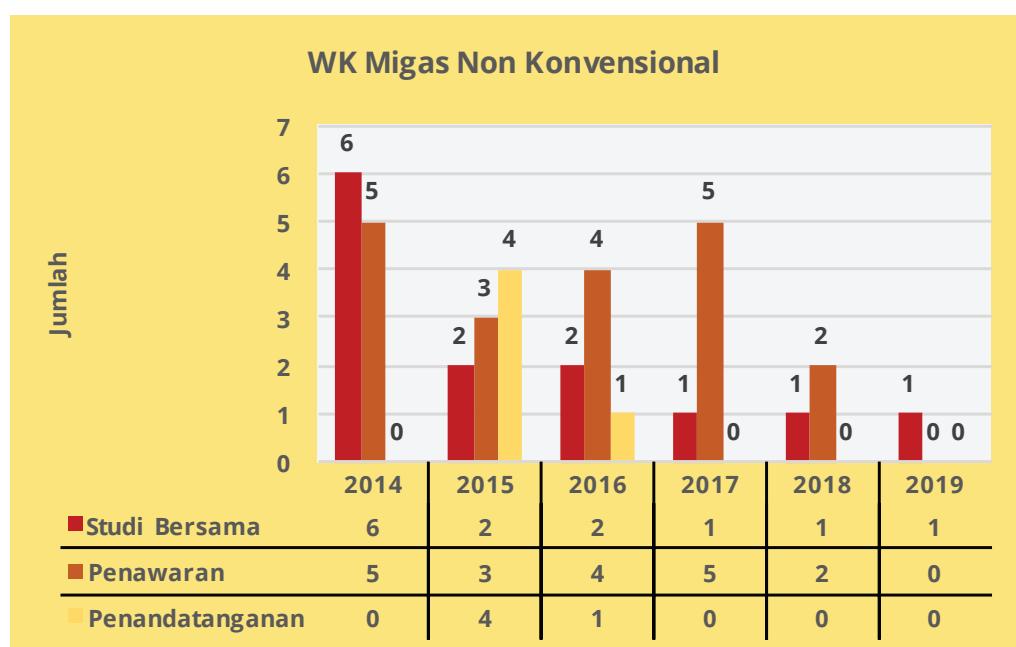
Selama tahun 2019, penandatanganan Kontrak Kerjasama (KKS) Migas yang telah dilakukan sebanyak 6 WK Migas. Hasil ini bisa dikatakan sangat baik mengingat keberhasilan penandatanganan KKS Migas ini tidak terlepas dari kerangka regulasi pengaturan kepemilikan dan penguasaan negara

atas sumber daya alam migas. Khusus mengenai pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

### b. Wilayah Kerja Non Konvensional

Pengembangan Migas Non Konvensional di Indonesia dimulai pada tanggal 27 Mei 2008 dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama Gas Metana Batubara pertama. Dan kemudian bertambah hingga 54 wilayah kerja sampai dengan 2012 dan kemudian dilanjutkan oleh pengembangan Shale Gas yang ditandai dengan penandatanganan WK

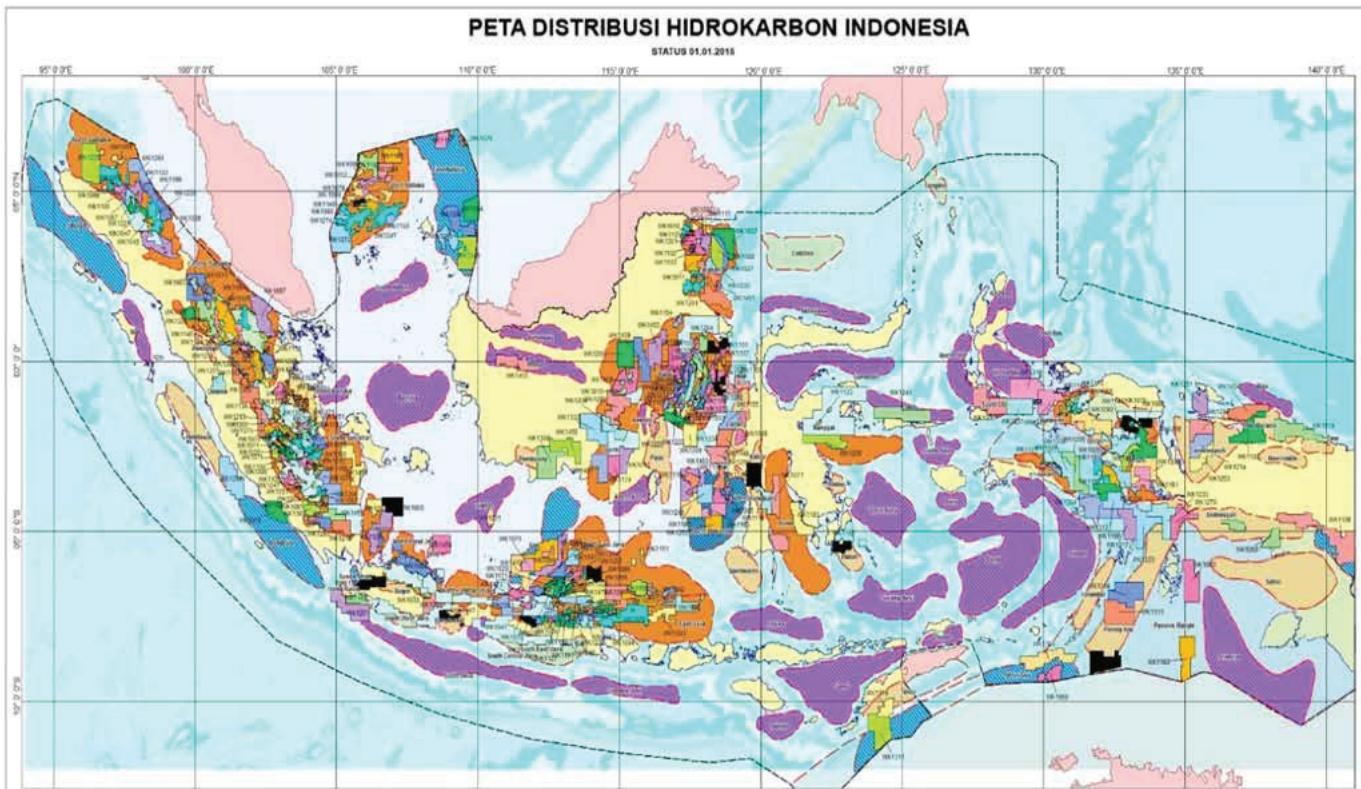
Migas Non Konvensional (Shale Gas) mulai 31 Januari 2013. Hingga tahun 2019 terdapat enam wilayah WK Migas Non Konvensional (Shale Gas) yang telah berjalan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan cadangan migas nasional yang sudah mulai mengalami penurunan.



Grafik 4. Jumlah Kegiatan Studi Bersama, Penawaran WK, dan Tandatanganan KKS

Terdapat dua isu utama tentang pengembangan migas non konvensional, isu pertama untuk Gas Metana Batubara adalah bagaimana gas metana batubara dapat berproduksi secara komersial. Sudah terdapat beberapa wilayah kerja yang sudah melakukan tes produksi dan menunjukkan adanya potensi gas metana batubara. Untuk selanjutnya peran pemerintah untuk membantu para investor tersebut untuk mempermudah kontraktor sehingga potensi gas metana batubara tersebut bisa diproduksikan secara ekonomis.

Isu yang kedua adalah untuk migas non konvensional khususnya shale hidrokarbon, di mana untuk eksplorasi hanya terdapat 6 wilayah kerja aktif, sehingga masih belum terbuktinya potensi migas non konvensional di Indonesia meskipun sumber dayanya yang cukup besar. Beberapa masalah antara lain perbedaan sifat fisik batuan shale yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri yang sudah berproduksi.



Gambar 4. Peta Distribusi Hidrokarbon Indonesia

Beberapa progres yang dikerjakan dalam pengembangan wilayah kerja migas non konvensional akan dilakukan penyempurnaan baik dalam penyiapan wilayah kerja, sistem pelelangan hingga *terms & conditions* dan bentuk kontrak yang diberlakukan. Sehingga, diharapkan dari upaya tersebut dapat membantu pencapaian target berupa penandatanganan 2 (dua) KKS Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk perbaikan tersebut masih belum menarik investor dengan

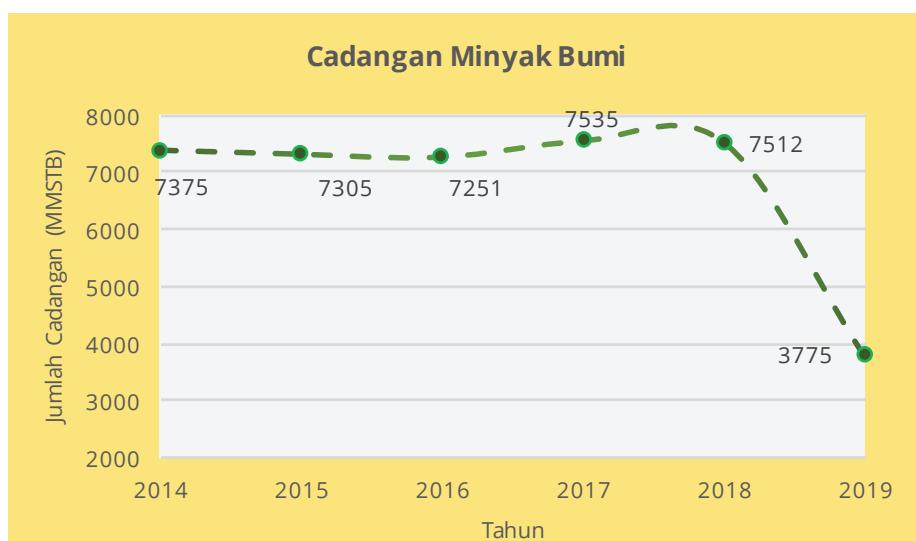
dibuktikan tidak terdapatnya lagi Usulan Penawaran Langsung melalui Studi bersama. Sehingga Pada tahun 2019 sesuai Arahan Presiden untuk terus menyederhanakan Peraturan, Saat ini terkait Pengusahaan Migas Non Konvensional dalam Proses pembahasan Pengusahaan Migas Non Konvensional dapat dilakukan bersamaan di dalam WK Migas (Konvensional) Eksisting dalam satu kontrak, sehingga untuk Lelang WK Migas Non konvensional ditunda sampai Proses Pembahasan selesai dilakukan.

## 2.3 CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

### c. Cadangan Minyak Bumi

Sebagaimana yang terlihat pada Grafik 5, cadangan minyak Indonesia (termasuk kondensat) terus mengalami penurunan seiring dengan minimnya penemuan cadangan baru sampai dengan tahun 2016. Sementara Tahun 2017 terjadi peningkatan cadangan, tercatat total cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.535 MMSTB dengan

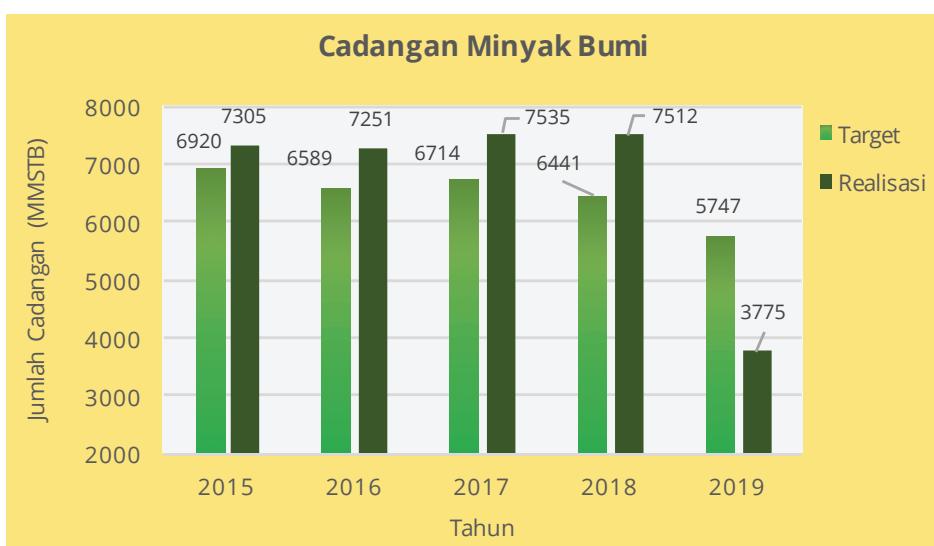
jumlah cadangan terbukti sebesar 3.171 MMSTB dan cadangan potensial sebesar 4.364 MMSTB. Peningkatan cadangan di tahun 2017 ini disebabkan oleh cadangan kondensat pada Lapangan Abadi. Sejak tahun 2018 perlahan terjadi penurunan lagi sampai dengan akhir 2019 sampai ke angka 3.775 MMSTB.



Grafik 5. Cadangan Minyak Bumi Indonesia

Dengan melihat persentase capaian antara target dan realisasi yang sudah ditetapkan, selama kurun

waktu 2015-1018, capaian mencapai lebih dari 100 % sebagaimana grafik 6 berikut :



Grafik 6. Target dan Realisasi Cadangan Minyak Bumi

Namun ditahun 2019, realisasi cadangan menurun ini dikarenakan antara lain:

- Adanya perubahan perhitungan klasifikasi cadangan yang didasarkan pada Petroleum Resources Management System (PRMS) 2018, dimana lapangan-lapangan yang tidak ada project pemproduksian (tidak diusahakan) cadangannya berpindah kelas menjadi contingent dan unrecoverable. Perubahan klasifikasi cadangan minyak bumi yang signifikan terjadi a.l. di lapangan-lapangan dari Pertamina

EP (P1 : 436; P2 : 491.21; P3 : 719.76 juta barel), PHE ONWJ (P1 : 202 juta barel), Rokan (P2 : 902.21 juta barel).

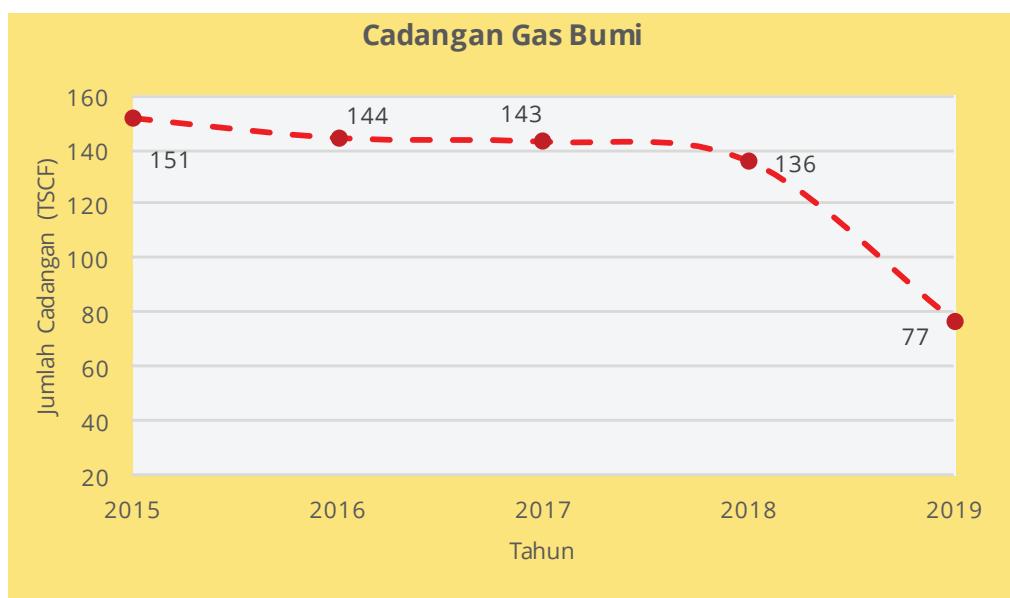
- Penurunan cadangan Kontraktor karena adanya perhitungan ulang dengan adanya pengeboran-pengeboran baru, ataupun oleh adanya data penunjang baru yang lain.

Sehingga mempengaruhi perhitungan realisasi cadangan dan ini berbeda dengan tahun 2018 ke belakang

#### d. Cadangan Gas Bumi

Seperti halnya cadangan minyak bumi, cadangan gas bumi Indonesia pun selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan (Grafik 7). Meskipun pencapaian cadangan gas bumi pada tahun 2017 masih kurang dari target, persentase angka pencapaian cadangan gas bumi masih berada di

atas 90% (Grafik 8). Realisasi lebih dari 90 % untuk cadangan gas bumi ini tidak hanya pada tahun 2017 saja, namun itu terjadi di tahun sebelumnya seperti tahun 2016. Bahkan pada tahun 2015, pencapaian melebihi target 147 TSCF dengan realisasi sebesar 151 TSCF.



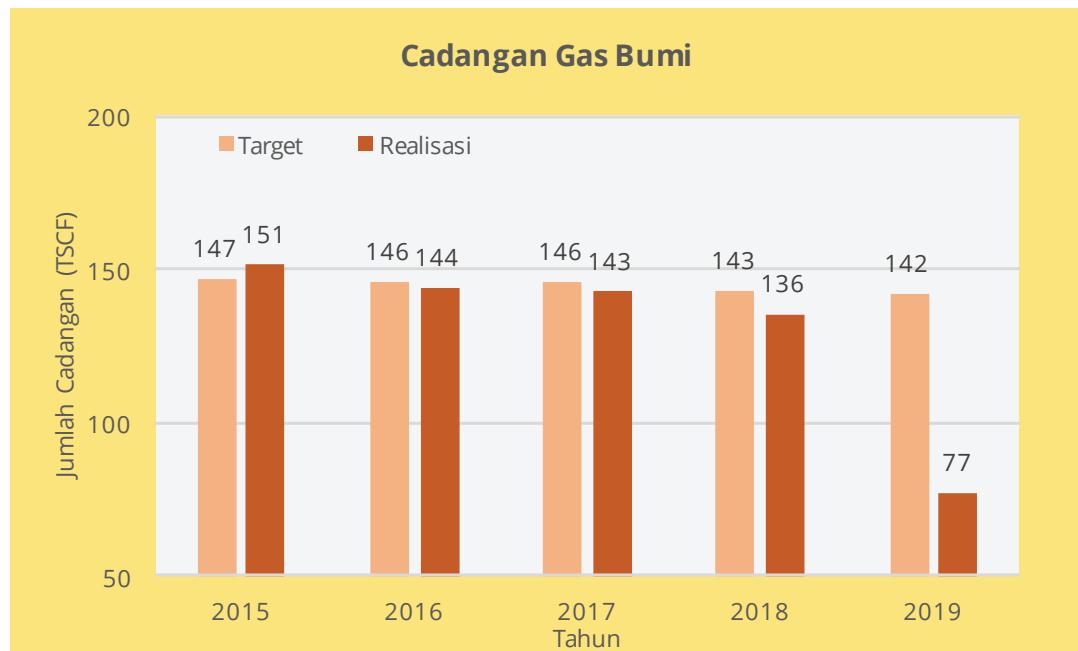
Grafik 7. Cadangan Gas Bumi Indonesia

Ditahun 2019 terjadi penurunan cadangan gas bumi secara signifikan menjadi 77 TCF yang semula ditargetkan sebesar 142 TCF (Grafik 8). Hal ini dikarenakan :

- Adanya perubahan perhitungan klasifikasi cadangan yang didasarkan pada Petroleum Resources Management System (PRMS) 2018, dimana lapangan-lapangan yang tidak ada

project pemproduksian (tidak diusahakan) cadangannya berpindah kelas menjadi contingent dan unrecoverable.

- Penurunan cadangan Kontraktor karena adanya perhitungan ulang dengan adanya pengeboran-pengeboran baru, ataupun oleh adanya data penunjang baru yang lain.



Grafik 8. Target dan Realisasi Cadangan Gas Bumi Indonesia



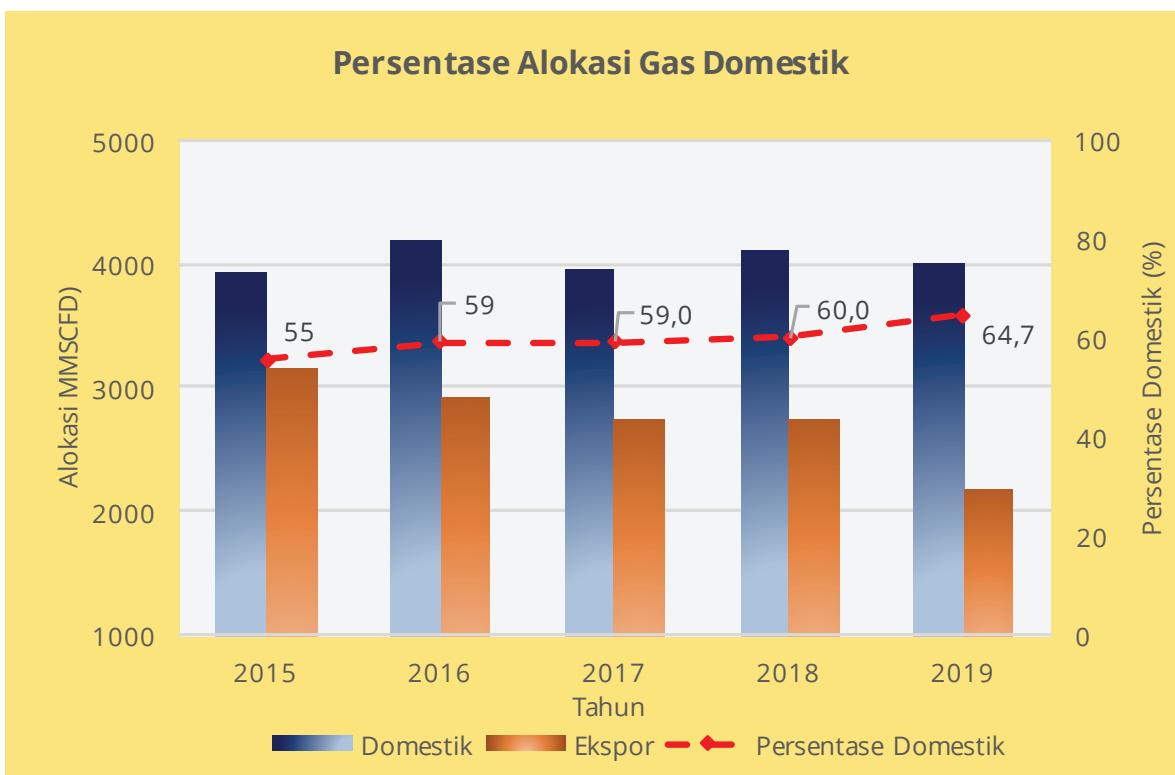
## 2.4 PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI

### Percentase Alokasi Gas Domestik

Pengelolaan energi diarahkan menuju energi berkeadilan melalui peningkatan akses energi secara merata dengan harga terjangkau dan tata kelola penyediaan energy yang lebih efisien. Untuk mendukung hal tersebut, penyediaan gas bumi harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap. Gas bumi tidak lagi dianggap sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional. Dalam hal ini, telah dicantumkan target alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik yang meningkat setiap tahunnya selama periode 2015-2019. Pemanfaatannya gas bumi dapat digunakan untuk tenaga listrik (PLTG), lifting minyak, penggunaan ammonia dan urea, bahan

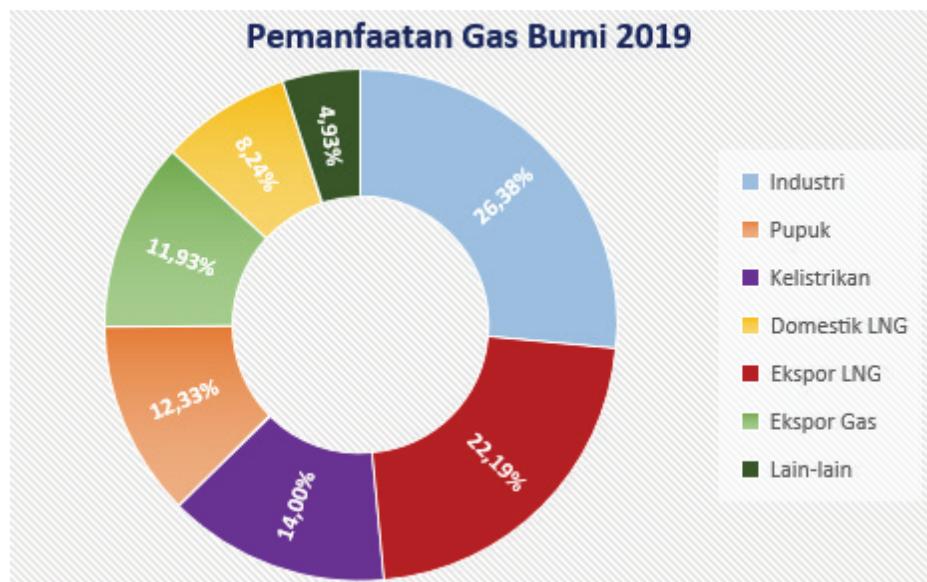
bakar pengganti minyak baik untuk industri, rumah tangga dan transportasi.

Selama periode 2015-2019, nilai realisasi alokasi gas untuk dalam negeri (domestik) telah melampaui nilai ekspor. Pada tahun 2019, pasokan gas untuk domestik sekitar 64,87% dengan capaian 101%. Total penyaluran gas bumi selama tahun 2019 adalah 6179,76 MMSCFD. Presentase realisasi alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik merupakan capaian yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti yang terlihat dalam Grafik 9. Ini merupakan capaian prestasi yang paling tinggi bagi pemerintah dalam menjaga komitmennya untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri.



Grafik 9. Percentase Alokasi Gas Bumi Domestik

Sedangkan realisasi pemanfaatan gas bumi untuk berbagai keperluan dibagai kedalam beberapa sektor sebagaimana Grafik 10 berikut:



Grafik 10. Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2019

Upaya yang akan terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan usaha pemanfaatan alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri antara lain:

- Mengurangi dan menghentikan suplai gas bumi untuk ekspor

- Melakukan pemerataan pembangunan pipa yang digunakan untuk mengalirkan gas

#### e. Fasilitasi Pembangunan FSRU

Pembangunan fasilitas *Floating Storage & Regasification Unit (FSRU)* / Regasifikasi / Onshore / *Liquefied Natural Gas Terminal* merupakan salah satu fokus pemerintah dalam menyediakan infrastruktur energi khususnya di subsektor minyak dan gas bumi. Pemerintah terus mendorong optimalisasi bauran energi salah satunya dengan

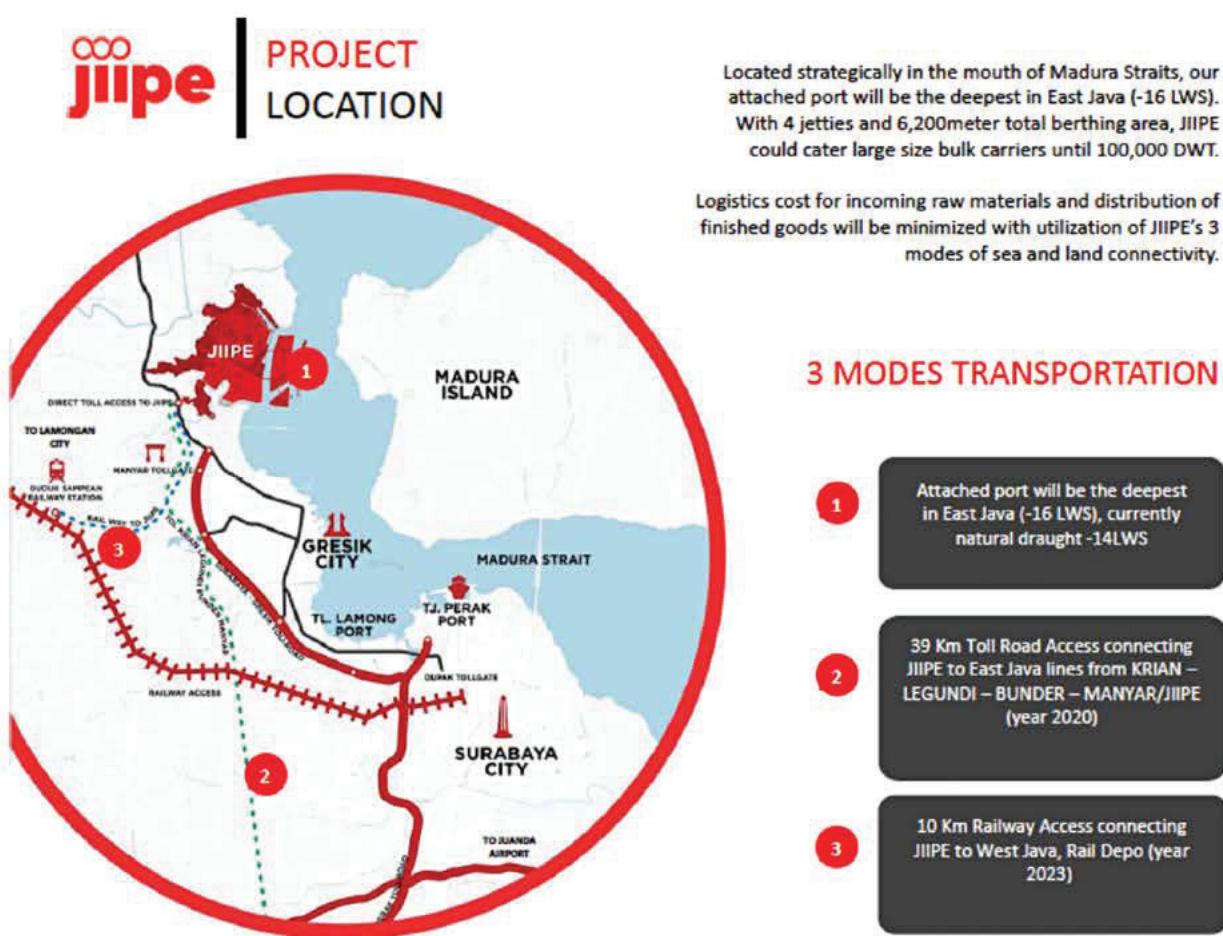
pembangunan berbagai macam infrastruktur energi guna mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2019 terdapat pengajuan 2 Badan Usaha yang meminta difasilitasi yaitu PT Nusantara Regas dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera.

**PT Berkah Kawasan Manyar**

Mengajukan permohonan pembangunan jaringan yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu JIipe- Kabupaten Gresik dengan pipa ukuran 16" sepanjang 1.4 km dari rencana yang dibangun sepanjang 2.2 km. Namun dari hasil evaluasi Ditjen Migas permohonan tersebut masih dipertimbangkan dikarenakan terdapat Badan Usaha yang sudah memiliki fasilitas infrastruktur gas bumi. Sesuai Permen ESDM No 04/2018 bahwa dipertimbangkan untuk menghindari suatu Wilayah Jaringan Distribusi yang memiliki fasilitas eksisting yang sama untuk dua atau lebih identitas yang berbeda (bertingkat).

**PT Nusantara Regas**

Badan Usaha ini berencana untuk membangun FSRU di Kota Cilacap guna memenuhi kebutuhan gas bumi untuk Kilang Minyak Cilacap dan industri di wilayah Cilacap - sekitarnya. Berdasarkan hasil evaluasi dijelaskan bahwa dari kondisi eksisting terdapat BU yang memiliki Izin Penyimpanan Sementara Migas yang akan habis di April 2021. Untuk itu perlu dipertimbangkan beberapa skenario yaitu skenario 1 bekerja sama dengan BU tersebut atau skenario 2 menunggu sampai tidak diperpanjangnya Izin Penyimpanan Sementara Migas April 2019.

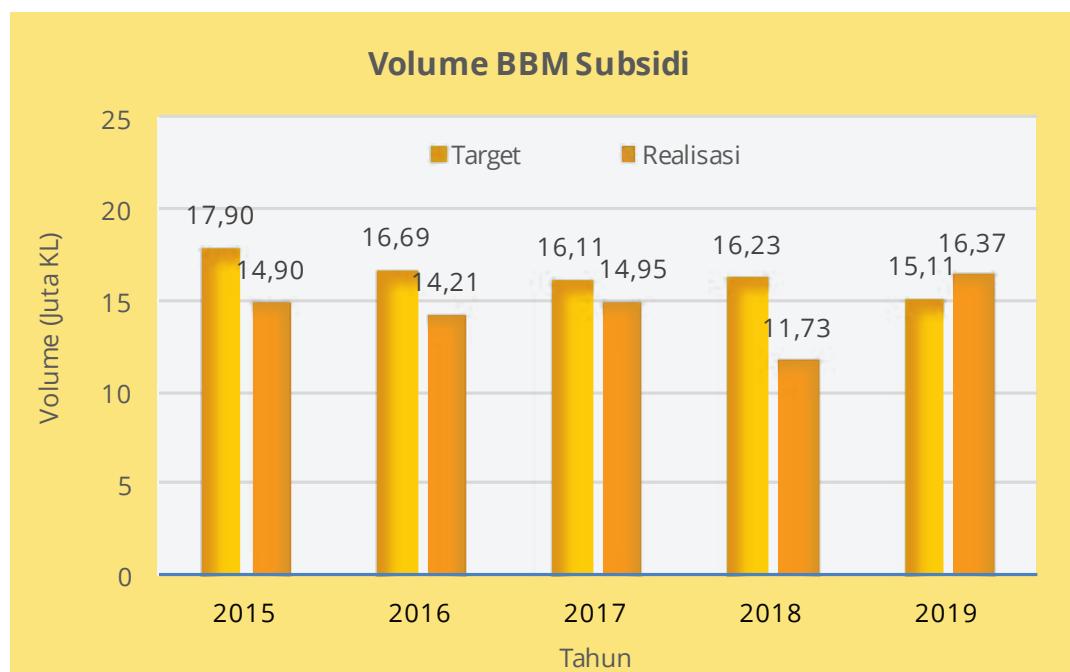


Gambar 5. Rencana Pembangunan Jaringan Pipa yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu JIipe – Kabupaten Gresik

## 2.5 VOLUME BAHAN BAKAR BERSUBSIDI

Pada tahun 2019, penugasan penyaluran BBM diberikan kepada PT. Pertamina dan PT. AKR. Selanjutnya, data realisasi dimaksud diverifikasi oleh BPH Migas. Target dan Realisasi BBM Bersubsidi dari tahun ke tahun terus menurun. Penurunan tersebut seiring langkah pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke produktif berupa pembangunan infrastruktur. Saat ini, pemerintah sudah tidak memberikan subsidi ke Premium semenjak tahun 2016 tetapi hanya menetapkan subsidi tetap pada solar dan

minyak tanah. Pada tahun 2019, Pemerintah telah menganggarkan subsidi BBM sebesar 15,11 Juta KL sesuai dengan target APBN yang sudah disetujui oleh DPR dengan pencapaian realisasi sebesar 16,37 Juta KL atau sebesar 92% dari target yang ditetapkan (grafik). Capaian realisasi BBM Bersubsidi ini mengalami penurunan 10% dari keberhasilan pengendalian volume BBM bersubsidi tahun 2018 di mana pada tahun 2018 targetnya adalah 16,23 Juta KL dengan realisasi volume BBM Bersubsidi 16,12 Juta KL



Grafik 11. Volume Target dan Realisasi BBM Subsid 2015-2019

Bahkan realisasi tahun 2019 melebihi target volume BBM bersubsidi tahun 2018. Apabila subsidi BBM ini dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi penghematan, kinerja penyediaan subsidi BBM ini akan dikatakan baik bilamana subsidi diberikan secara tepat sasaran. Kuota volume Jenis BBM

Tertentu tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,12 juta KL (6,90%) dibandingkan Kuota volume Jenis BBM Tertentu tahun 2018 sebesar 16,23 juta KL (Grafik 11) dengan rincian masing-masing jenis BBM dapat dilihat pada tabel berikut :

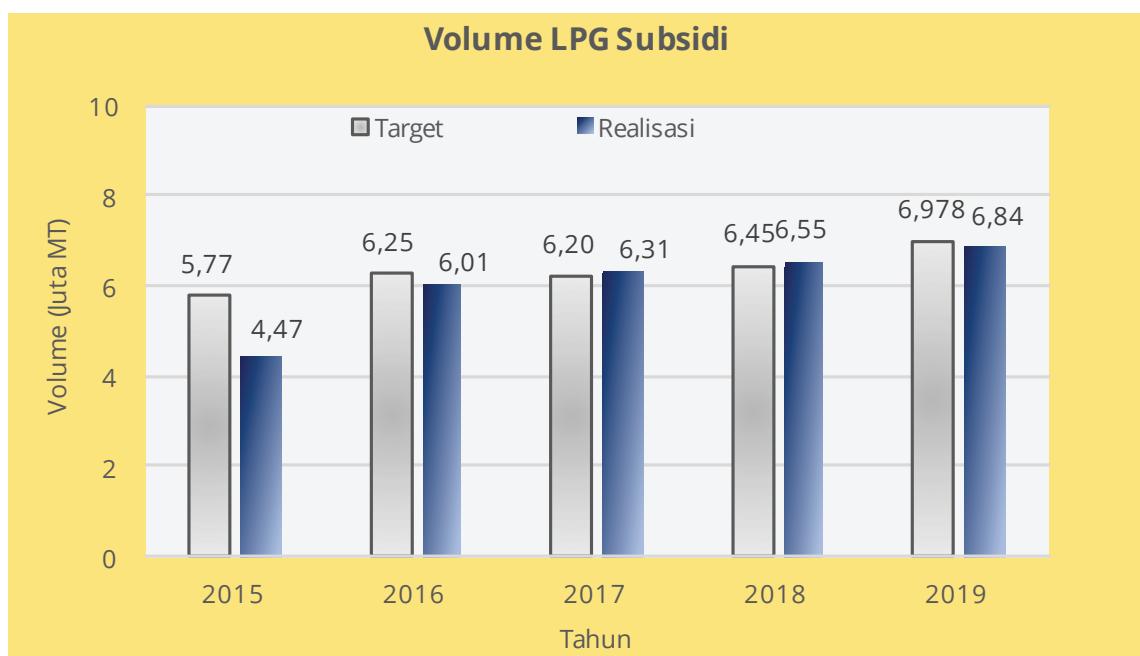
Tabel 1. Realisasi Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) Tahun 2019

NO	KEGIATAN	OUTPUT	REALISASI FISIK (%)
1.	Bensin (Gasoline) RON 88	-	-
2.	Minyak Tanah	0,610	0,52
3.	Minyak Solar (Gasoil)	14,50	15,85
	<b>TOTAL</b>	<b>15,11</b>	<b>16,37</b>

## 2.6 VOLUME LPG BERSUBSIDI

Realisasi penyaluran LPG 3 Kg diperoleh dari data Pertamina dan diverifikasi oleh Ditjen Migas. Target volume LPG Bersubsidi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan diterapkannya program diversifikasi BBM ke Gas.

Tercatat realisasi sampai dengan akhir tahun 2019, volume LPG Bersubsidi sebesar 6,84 Juta MTon dari target 6,978 Juta MTon. Adapun target dan realisasi LPG Bersubsidi selama lima tahun terakhir lebih rinci dapat terlihat pada Grafik 12 berikut:



Grafik 12. Volume Target dan Realisasi LPG Bersubsidi 2015-2019

Berdasarkan data terget APBN dan realisasi tersebut maka pencapaian kinerja sebesar 102%. Kuota Volume LPG Tabung 3 Kg ini mengalami kenaikan sebesar 0,528 juta MTon (8,19%) dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 6,45 juta Mton. Hal ini disebabkan karena pada 2 tahun kebelakang antara tahun 2017-2018 realisasi Volume LPG tabung 3 Kg melebihi kuota yang ditetapkan oleh APBN dan dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan LPG tabung 3 Kg di masyarakat, dengan begitu maka Kuota tahun 2019 mengalami penambahan menjadi 6,978 Juta MTon.

Untuk mengurangi konsumsi LPG Tabung 3 Kg, PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg melakukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan LPG tabung 3 Kg melalui:

1. Melakukan Trade in LPG 3 Kg ke 5,5 Kg
2. Memperbanyak supply dan penyebaran LPG 5,5 Kg

Adapun upaya yang terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melakukan

pengendalian subsidi LPG Tabung 3 Kg ini antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 Kg agar lebih tepat sasaran;
2. Membuat kuota LPG 3 Kg per kabupaten/kota;
3. Melakukan sosialisasi pengendalian LPG 3 Kg ke Pemerintah Daerah, yang ditindaklanuti oleh

pemerintah daerah berupa surat himbauan Pemerintah Daerah terkait penggunaan LPG 3 Kg (saat ini yang telah teridentifikasi 11 Gubernur dan 152 Walikota/Bupati);

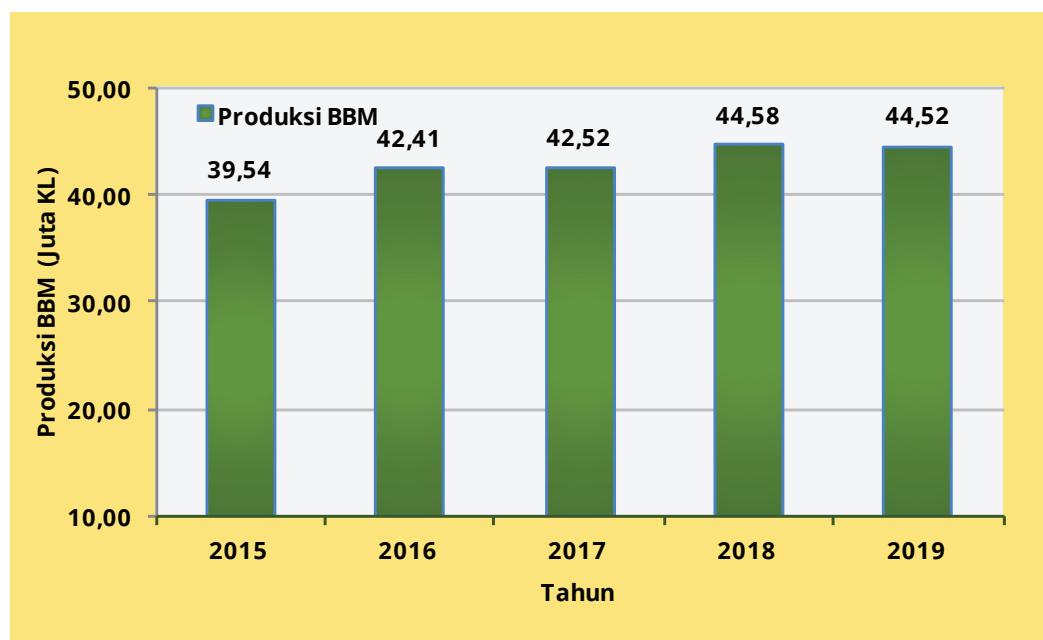
4. Bekerja sama dengan kepolisian Republik Indonesia dalam penindakan penyelewengan subsidi LPG 3 Kg.

## 2.7 KAPASITAS KILANG BBM

### a. Produksi BBM dari Kilang dalam Negeri

Untuk produksi BBM dari kilang minyak dalam negeri pada tahun 2019 adalah 44,52 juta KL (capaian 106%). Total produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini lebih besar dari yang ditargetkan sebesar 42 juta KL, hal ini disebabkan karena ada penambahan produk dan volume produksi Bahan

Bakar Minyak jenis Pertamax dan Avtur dengan beroperasinya Proyek Langit Biru Cilacap, RU IV PT Pertamina (Persero). Data produksi BBM 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dalam Grafik 13 berikut :



Grafik 13. Produksi BBM dari Kilang Dalam Negeri Tahun 2015-2019

### b. Kapasitas Kilang BBM dalam Negeri

Kapasitas kilang minyak di Indonesia tahun 2019 adalah 1.169 MBCD, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata usia kilang sekitar 30 tahun. Dari tahun 2015 hingga 2019

kapasitas kilang BBM di Indonesia tidak mengalami perubahan sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kapasitas Kilang BBM Nasional

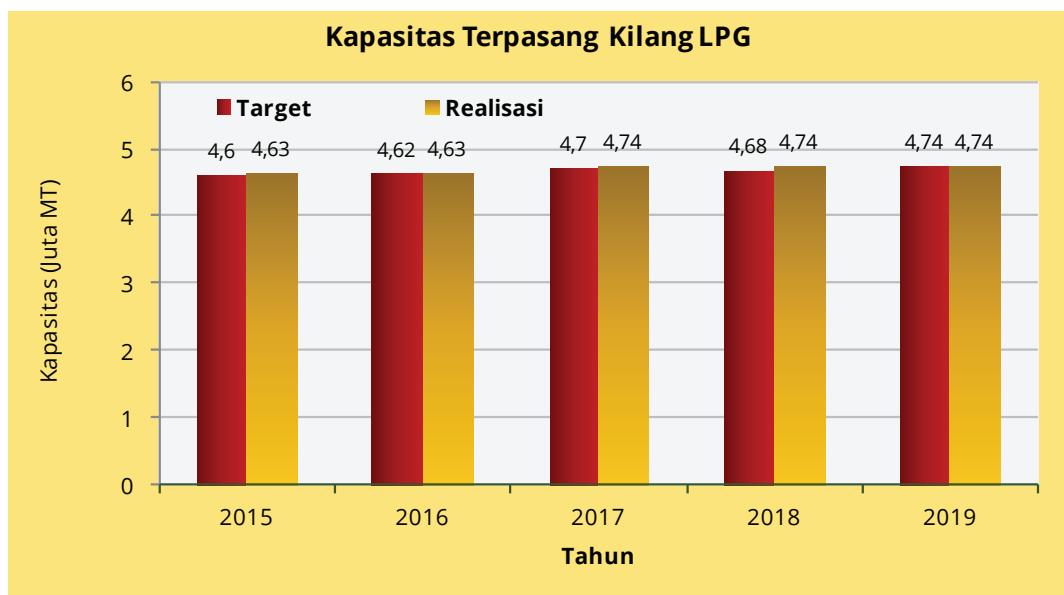
Tahun	Target (MBCD)	Realisasi (MBCD)
2015	1.169	1.169
2016	1.167	1.169
2017	1.169	1.169
2018	1.169	1.169
2019	1.169	1.169

Belum selesainya proyek pengembangan kilang minyak RDMP PT Pertamina (Persero) dan proyek pembangunan kilang minyak GRR PT Pertamina (Persero) menyebabkan belum bertambahnya kapasitas kilang minyak di Indonesia. Terhambatnya proyek RDMP maupun GRR dikarenakan salah satunya belum adanya kesepakatan antara Pertamina dengan Investor dalam hal pelaksanaan proyek dimaksud, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang berdampak pada terhambatnya

pembebasan lahan disekitar lokasi proyek. Hal ini mengakibatkan kegiatan pengolahan crude oil menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih seperti tahun-tahun sebelumnya yang belum efisien dan kompleksitasnya yang rendah. Dengan meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri dipenuhi dari impor.

## 2.8 KAPASITAS TERPASANG KILANG LPG

Realisasi Kapasitas kilang LPG selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :



Grafik 14. Kapasitas Kilang LPG Periode 2015-2019

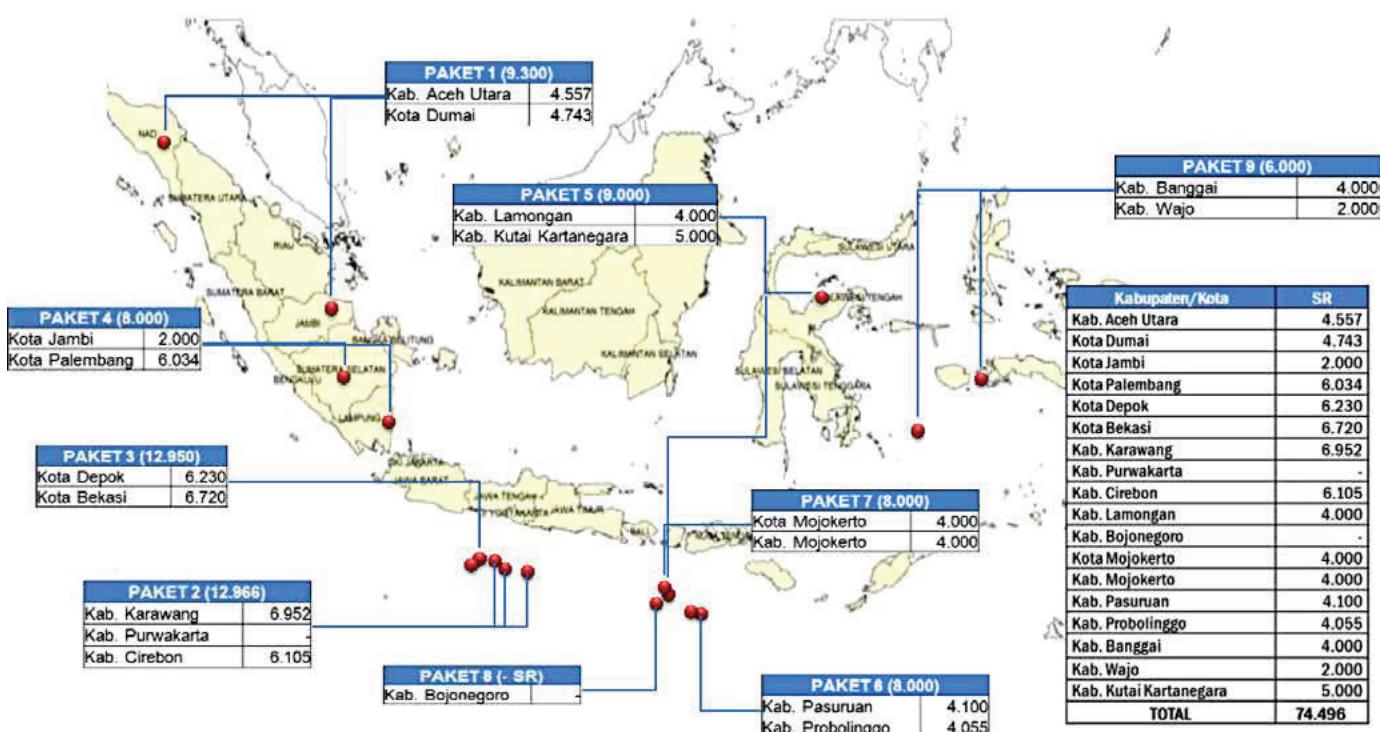
Selama tahun 2019 tidak dilakukan pembangunan dan pengembangan kilang gas (LPG) sehingga menyebabkan kapasitas Kilang LPG tidak mengalami pertambahan pada tahun 2019. Namun demikian, kapasitas produksi LPG dapat meningkat setelah selesainya proyek pengembangan kilang minyak

RDMP dan pembangunan kilang minyak GRR PT. Pertamina yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil perhitungan tim, penambahan kapasitas kilang yang akan terjadi jika kilang RDMP dan GRR selesai pada 2024-2026 adalah sekitar 30%-45%.

## 2.9 PEMBANGUNAN JARINGAN GAS RUMAH TANGGA

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan lokasi di Kota Palembang dan Kota Surabaya. Pembangunan selanjutnya menyebar ke beberapa Provinsi sampai dengan tahun 2019, total rumah tangga tersambung jaringan Gas adalah sebanyak 400.269 SR di 17 Provinsi 47 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil penyusunan dokumen Front End Engineering Design (FEED) – Detail Engineering Design for Construction (DEDC), pada TA 2019 Ditjen Migas c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas telah melaksanakan pembangunan jaringan

gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 74.496 SR dari target pada Perjanjian Kinerja sebanyak 78.216 SR dengan penugasan pada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. sebagai Tim Pendukung pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Tidak tercapainya 4.000 SR untuk Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kab. Bojonegoro dikarenakan waktu untuk penyelesaian pembangunannya tidak mencukupi, saat pemenang lelang diumumkan pada akhir Juli 2019. Berikut sebaran Wilayah yang sudah terbangun jaringan gas rumah tangga sepanjang tahun 2019 beserta total realisasinya.



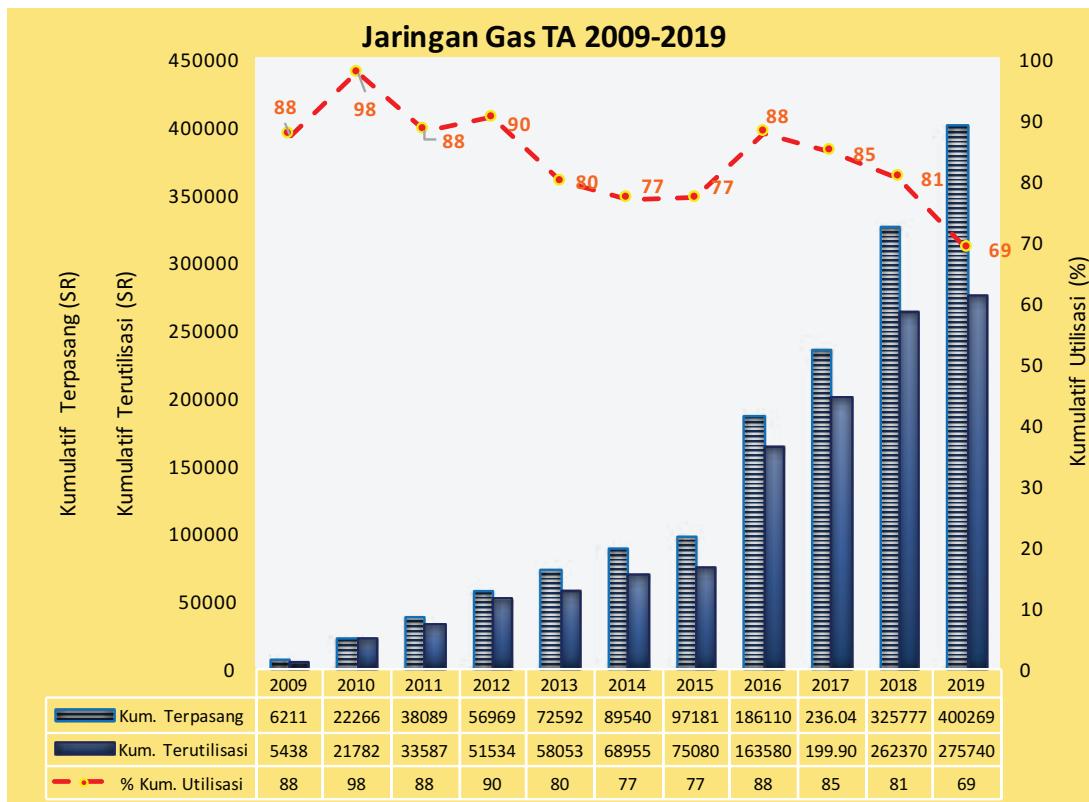
Gambar 6. Total Realisasi Pembangunan Jargas APBN Tahun 2019 : 74.496 SR (16 lokasi)

Dengan progress kegiatan sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut

Tabel 3. Progres Kegiatan Jargas sampai dengan Akhir 2019

NO	PAKET	KEGIATAN	OUTPUT	NILAI KONTRAK (Rp. M)	REALISASI		KETERANGAN
					FISIK (%)	KEU (%)	
<b>Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga (EPC)</b>							
1	1	Kab. Aceh Utara	4.557 SR	94,102	100	100	Telah BAST-1 tanggal 15 Desember 2019
2		Kota Dumai	4.743 SR				
3	2	Kab. Karawang	6.952 SR	94,965	100	100	Telah BAST-1 tanggal 7 Desember 2019
4		Kab. Cirebon	6.105 SR				
5	3	Kota Depok	6.230 SR	100,159	100	100	Target BAST-1 tanggal 24 Desember 2019
6		Kota Bekasi	6.720 SR				
7	4	Kota Jambi	2.000 SR	68,919	100	100	Target BAST-1 pada 26 Desember 2019
8		Kota Palembang	6.034 SR				
9	5	Kab. Lamongan	4.000 SR	79,841	100	100	Telah BAST-1 tanggal 13 Desember 2019
10		Kab. Kutai Kartanegara	5.000 SR				
11	6	Kab. Pasuruan	4.100 SR	67,071	100	100	Telah BAST-1 tanggal 25 November 2019
12		Kab. Probolinggo	4.055 SR				
13	7	Kota Mojokerto	4.000 SR	70,198	100	100	Telah BAST-1 tanggal 28 November 2019
14		Kab. Mojokerto	4.000 SR				
15	8	Kab. Bojonegoro	4.000 SR	-	-	-	Pembangunan ditunda ke tahun 2021, anggaran digunakan untuk pembayaran tunggakan paket perdana konversi mitan ke LPG 3 kg TA 2018
16	9	Kab. Banggai	4.000 SR	70,864	100	100	Telah BAST-1 tanggal 27 November 2019 Terdapat sisa kontrak Rp. 117.284.756,00
17		Kab. Wajo	2000 SR				

Sedangkan keseluruhan total realisasi dari tahun 2009 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Grafik 15 berikut:



Grafik 15. Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga APBN TA 2009-2019

## 2.10 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA BAHAN BAKAR GAS (KERJA SAMA PEMBANGUNAN SPBG DENGAN NEDO)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas melalui pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi, Pemerintah terus melakukan upaya penambahan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh BBG untuk transportasi jalan. Upaya tersebut antara lain dengan kerja sama hibah dengan the New Energy and Industrial Technology Development Organization Japan (NEDO), dan pada tanggal 11 Desember 2017 telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MOU)* tentang *Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure Including Support of Development of Sustainable Environment*.

Melalui kerja sama hibah tersebut rencananya akan dibangun 3 (tiga) unit SPBG yang berlokasi:

1. Jalan Abdul Muis, Jakarta;

2. Jalan Sudirman, Tangerang Banten; dan
3. KIIC Karawang, Jawa Barat.

Dalam rangka implementasi kegiatan *Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure Including Support of Development of Sustainable Environment* tersebut perlu dilakukan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan perencanaan. Hal ini juga mengingat implementasi kegiatan melibatkan instansi lain di luar Kementerian ESDM.

Pada tanggal 17 Desember 2019, telah dilaksanakan peresmian SPBG di KIIC Karawang, Jawa Barat yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang mewakili Menteri ESDM, sedangkan untuk 2 (dua) lokasi lainnya yaitu di Jalan Abdul Muis-Jakarta dan Jalan Sudirman – Tangerang, Banten, direncanakan akan selesai pembangunannya di tahun 2021.

## 2.11 JUMLAH REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP TARGET APBN

Berdasarkan Rapat Pemerintah dan DPR diperoleh asumsi makro yaitu *lifting* minyak bumi sebesar 775 MBOPD, *lifting* gas bumi sebesar 1.250 MBOED dan harga minyak (ICP) sebesar US\$ 70 barel. Sedangkan besaran realisasi penerimaan negara Migas itu sendiri dipengaruhi oleh realisasi *lifting* migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), Cost Recovery dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US\$. Tercatat realisasi sampai dengan akhir desember, *lifting* sebesar 745,61 MBOPD, *lifting* gas bumi sebesar 1.057MBOEPD, dan ICP 62,37 US\$/Barrel. Dari hasil

realisasi itu menghasilkan realisasi penerimaan migas sebesar 185,44 Triliun rupiah atau mencapai 79 % dari target yang sudah ditetapkan sebesar 234,73 Triliun rupiah. Nilai penerimaan ini tentu lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 215 Triliun rupiah. Turunnya *lifting* migas menjadi salah satu penyebab penurunan Penerimaan Migas di tahun 2019. Lebih lengkap berikut data target dan realisasi PNBP selama lima tahun terakhir pada Grafik 16.



Grafik 16. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Sektor Migas 2015-2019

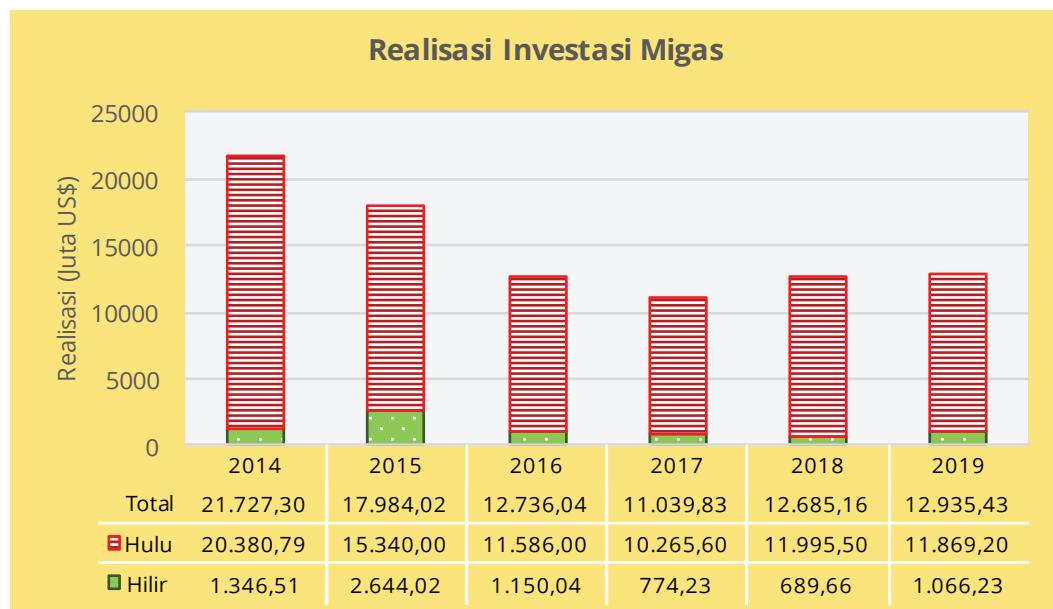
Penerimaan Negara melalui subsektor Migas berasal dari beberapa hal berikut, antara lain:

- Penerimaan Pajak Migas (PPh Migas)  
Kegiatan usaha hulu migas berbasis kontrak (antara pemerintah dengan KKKS)
- PNBP SDA Migas  
Hasil penjualan *lifting* migas bagian negara. Nantinya pendapatan negara dari *lifting* migas juga menjadi sumber pendapatan daerah dalam Dana Bagi Hasil.  
Dana hasil penjualan *lifting* migas disimpan dalam:
  - Rekening Migas di Bank Indonesia
  - Langsung disetor ke kas negara dalam

bentuk rupiah, khususnya hasil penjualan volume migas yang dibeli oleh Pertamina sebagai PNBP. (diatur dalam PP 41 Tahun 1982 tentang kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan pemerintah dari hasil operasi pertamina sendiri dan PSC dan melalui UU 8 tahun 1971 tentang Pertamina (yang diubah menjadi UU 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi)

- PNBP Lainnya terdiri dari DMO, denda, bonus produksi, transfer aset, pengembalian sisa biaya operasional SKK Migas, dan pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas.

## ■ 2.12 INVESTASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



Grafik 17. Realisasi Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2014 – 2019

Sebagaimana yang terlihat pada Grafik 17, Realisasi investasi Migas tahun 2019 sebesar US\$ 12.935 Miliar berasal dari sektor hulu sebesar US\$ 11.869 Miliar yang didapat dari *capital & non-capital expenditure* KKKS Eksplorasi (PSC), KKKS Produksi (PSC), dan KKKS Produksi (GSC) dan US\$ 1.066 Miliar yang diperoleh dari Badan Usaha sektor hilir. Realisasi total Investasi hulu maupun hilir ini mencapai 96% dari angka yang ditargetkan sebesar US\$ 13,43 Miliar.

Apabila dibandingkan dengan investasi hulu, realisasi investasi hilir lebih resisten terhadap dinamika perubahan harga minyak bumi. Dengan kata lain, naik turunnya harga minyak dalam

satu tahun tidak semerta-merta mempengaruhi realisasi investasi hilir migas di tahun terkait maupun tahun selanjutnya. Hal ini berbeda dengan realisasi investasi hulu migas yang sangat responsif terhadap perubahan harga minyak bumi. Mengingat realisasi investasi migas didominasi oleh investasi hulu migas, maka total realisasi investasi migas menjadi sangat dipengaruhi oleh harga minyak bumi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga nilai investasi sejauh ini bersifat internal. Faktor eksternal seperti harga minyak dunia tidak dapat dihindari karena memang sudah mekanisme pasar. Berikut tantangan dan solusi dalam rangka menggairahkan investasi baik di hulu maupun hilir migas

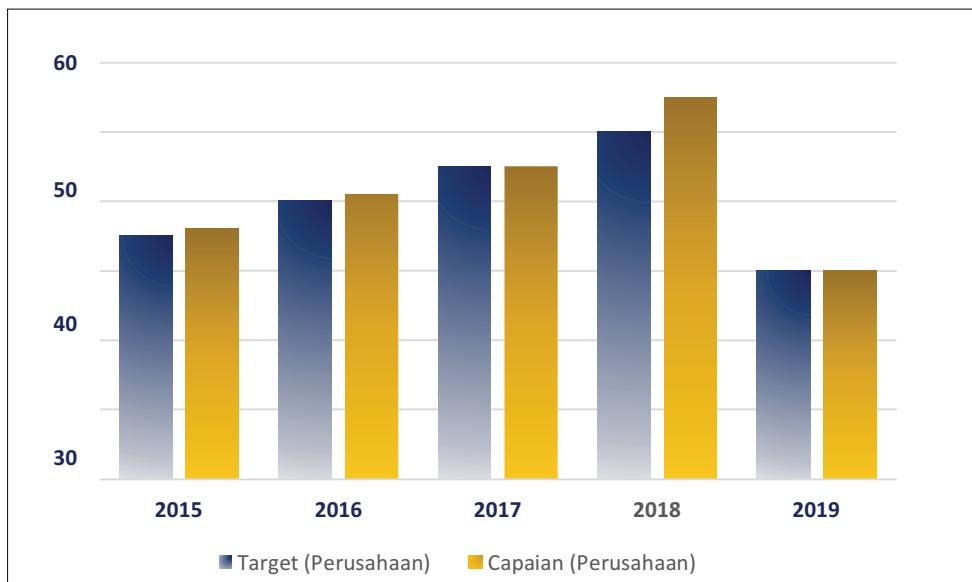
Tabel 4. Tantangan dan Solusi Investasi Hulu dan Hilir Migas

	TANTANGAN	SOLUSI
HULU	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terbuktinya potensi Shale Gas di Indonesia</li> <li>2. Terms &amp; conditions dinilai kurang menarik bagi investor</li> <li>3. Keekonomian proyek migas non konvensional</li> <li>4. Gagalnya beberapa proyek pengembangan migas non konvensional</li> <li>5. Ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan dan akses lainnya yang masih terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbukaan data dan <i>joint study</i> dan survei umum akan dipermudah</li> <li>2. Lelang WK dipermudah</li> <li>3. Percepatan POD</li> <li>4. Implementasi inovasi dan teknologi tepat guna</li> <li>5. Penerapan kontrak gross split</li> <li>6. Penyederhanaan perizinan</li> </ul>
HILIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebasan lahan untuk pembangunan kilang</li> <li>2. Belum ada kesepakatan teknis dengan pihak investor untuk pembangunan kilang.</li> <li>3. Fasilitas insentif dan perpanjangan kilang minyak belum tersedia</li> <li>4. Peningkatan pemanfaatan gas bumi</li> <li>5. Persinggungan dengan utilitas instansi lain dalam pembangunan jaringan gas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyederhanaan perizinan sesuai implementasi Permen ESDM No. 52 tahun 2018</li> <li>2. Perlu revisi perpres 146 tahun 2015 (pengolahan, pembebasan lahan, insentif)</li> <li>3. Pengembangan infrastruktur gas bumi</li> </ul>

## 2.13 JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN KETEKNIKAN YANG BAIK

Sebagaimana pada grafik 16 terlihat bahwa kurun waktu 5 tahun terakhir, capaian Ditjen Migas dengan indikator jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik mencapai 100%. Ditahun 2019, dari target sebanyak 30 perusahaan, semuanya 100% terealisasi. Ini menunjukan bahwa telah dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan keteknikan yang baik. Pengawasan keteknikan yang baik adalah dengan penerapan metode rekayasa keteknikan yang telah terbukti, praktik-praktik, prosedur yang diterima secara luas, efisien dan memenuhi regulasi yang ada. Dalam melakukan pengawasan keteknikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi dapat diukur dengan:

- 1) Dampak terhadap sumber daya dan lingkungan seperti program inovatif penurunan emisi melalui manajemen yang baik, substitusi bahan berbahaya, dan perawatan peralatan yang lebih baik.
- 2) Pencegahan terbuangnya sumber daya antara lain pemanfaatan gas suar bakar.
- 3) Identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan dampak.
- 4) Pemenuhan kewajiban pelaporan, kecelakaan, tumpahan minyak, pemakaian bahan kimia dan produksi limbah, dan baku mutu emisi dan limbah.



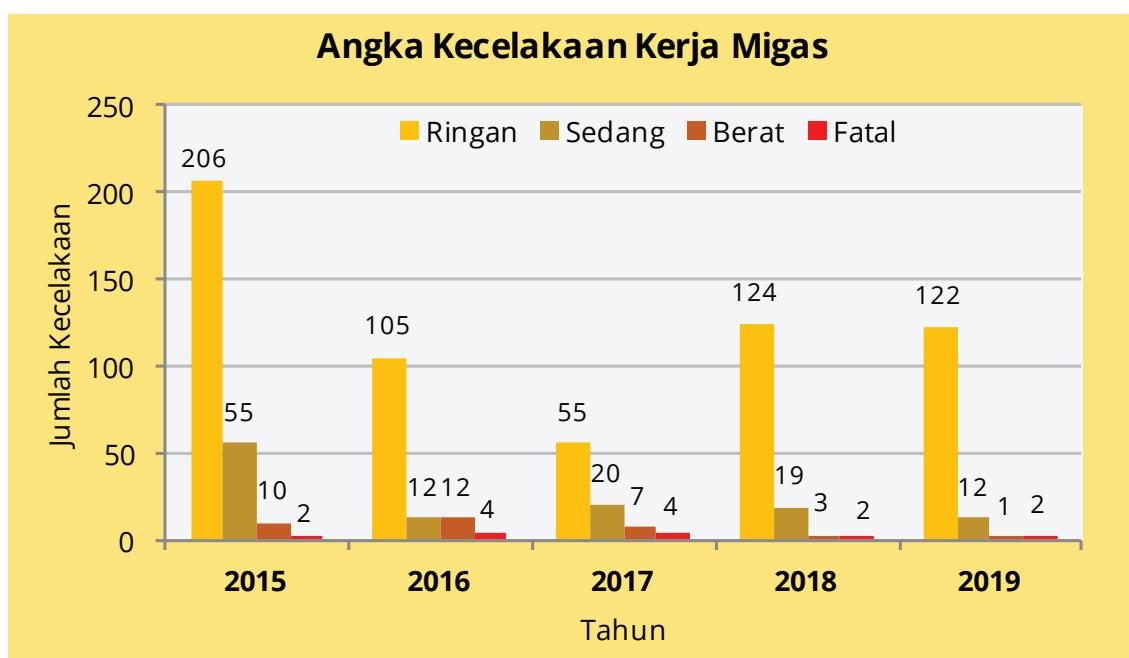
Grafik 18. Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Keteknikan yang Baik

## 2.14 JUMLAH PERUSAHAAN HULU DAN HILIR MIGAS YANG KEGIATAN OPERASINYA TIDAK TERJADI KECELAKAAN FATAL

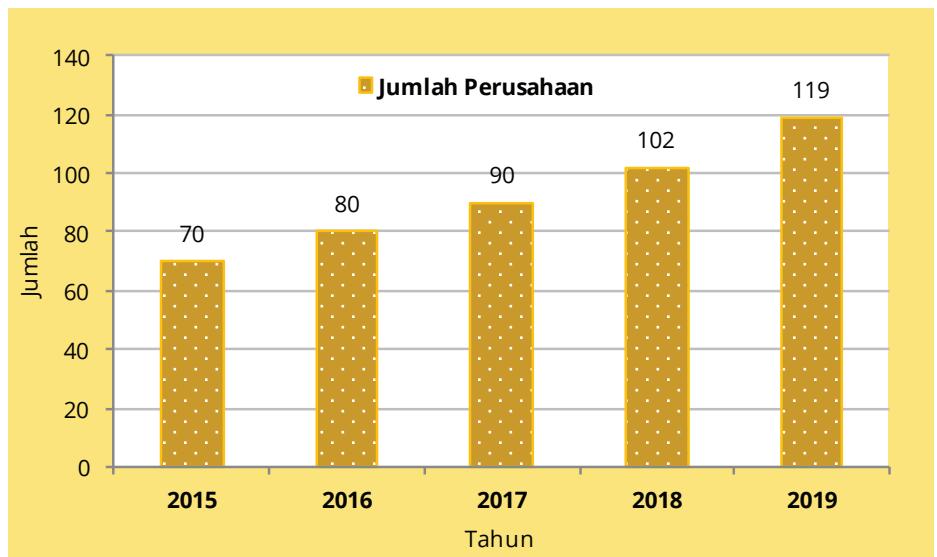
### a. Hulu

Realisasi indikator kinerja ini tercatat sampai dengan akhir 2019, jumlah kecelakaan akibat kerja di kegiatan usaha hulu migas dengan kategori fatal sejumlah 2. Jumlah tersebut masih bertahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga berjumlah 1. Ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya berjumlah 3 kejadian. Sedangkan

jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kategori berat adalah 3. Informasi lebih lengkap selama kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah kecelakaan kerja di kegiatan usaha hulu migas terlihat pada Grafik 19 berikut.



Grafik 19. Jumlah Kecelakaan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

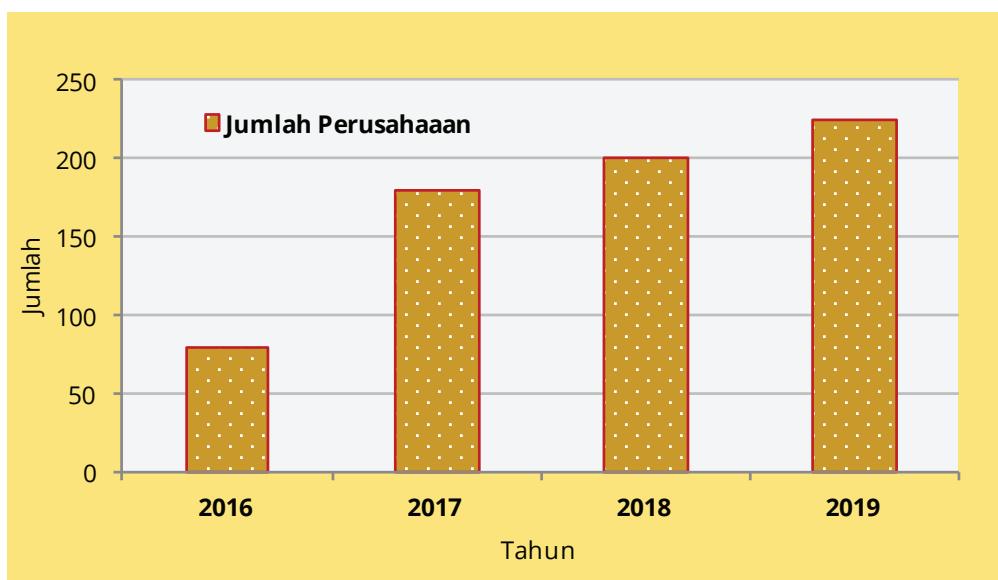


Grafik 20. Jumlah Perusahaan Hulu Migas yang Kegiatan Operasinya Tidak terjadi Kecelakaan Fatal

Sehingga jika dilihat capaian Ditjen Migas pada indikator ini dapat dilihat pada Grafik 20. Setiap tahun Ditjen Migas mencatat bahwa jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal semakin meningkat. Dari 110 perusahaan yang ditargetkan 2019, realisasi menunjukkan sejumlah 119 perusahaan. Hal ini menunjukkan peran Ditjen Migas dalam pembinaan dan pengawasan, berkomitmen dalam mendorong kegiatan usaha migas sesuai dengan kaidah keselamatan.

#### b. Hilir

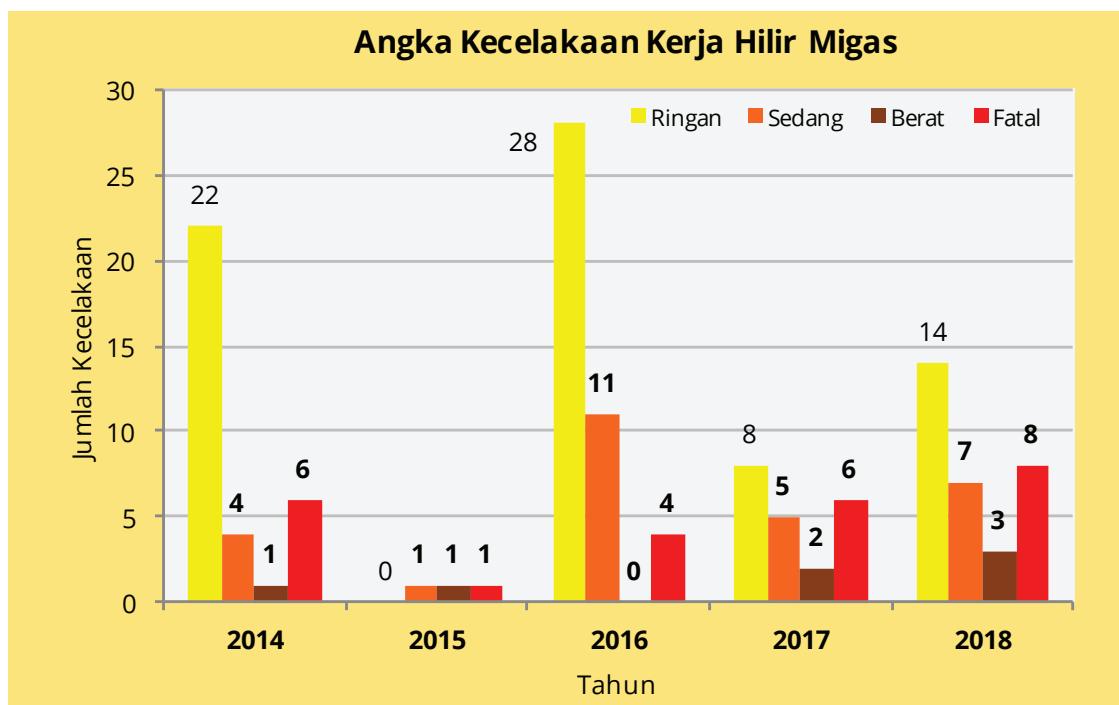
Sepanjang tahun 2019, sebanyak 225 badan usaha hilir migas yang dilakukan pengawasan oleh Ditjen Migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja dari angka yang ditargetkan 225 Perusahaan atau realisasi pencapaian sebesar 100% (Grafik 19).



Grafik 21. Jumlah Perusahaan Hilir Migas yang Kegiatan Operasinya Tidak terjadi Kecelakaan Fatal

Sedangkan angka kecelakaan kerja dengan kategori ringan sampai dengan fatal selama 5 tahun sepanjang 2014-2018 dapat dilihat pada Grafik 20. Kerjasama yang baik antara Internal maupun eksternal seperti *stakeholder* pada kegiatan usaha hilir migas beserta dibentuknya Tim Independen

Keselamatan Migas membantu Inspektur Migas dalam melaksanakan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) dan Investigasi Kecelakaan Migas menjadi upaya untuk mendorong kegiatan usaha hilir migas dapat mencegah terjadinya kecelakaan.



Grafik 22. Jumlah Kecelakaan dalam Kegiatan Usaha Hilir Migas

# BAB III

## ANGGARAN

### 2021



RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2021**

Memasuki tahun 2020, negara-negara di dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada pandemic COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian dunia juga Indonesia. Pemerintah baik di negara lain maupun Indonesia terus berupaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 dengan menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas penduduk dan ekonomi. Perubahan Kebijakan penganggaran tahun 2020 menjadi salah satu cara untuk mengurangi dampak pandemik ini. Pemerintah pusat telah melakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalkan pendanaan yang tersedia sehingga terdapat celah fiskal yang dapat dimanfaatkan. Efisiensi dilakukan dengan pemotongan anggaran melalui penundaan beberapa kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Terkait proyek yang dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang telah dimulai pelaksanaannya.

Anggaran Direktorat Jenderal Migas yang semula 4,115 triliun rupiah berubah menjadi 2,013 triliun rupiah. Dari nilai tersebut penghematan sebesar 51,1 % atau 2,102 triliun rupiah dialokasikan untuk belanja kebutuhan dasar dan antisipatif serta fokus belanja untuk mendukung prioritas pembangunan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM). Efisiensi anggaran dilakukan sebagian besar pada pembangunan infrastruktur migas seperti kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang masih proses tender juga termasuk kegiatan Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg, Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran, Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran. Untuk kegiatan Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg, Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran dan Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran yang terdampak pemotongan anggaran di TA 2020, sudah dimasukkan dalam perencanaan anggaran TA 2021. Lebih rinci belanja infrastruktur sebelum dan sesudah adanya efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Alokasi Anggaran 2021 untuk Infrastruktur

No	<b>Pembangunan Infrastruktur Migas</b>	<b>Pagu (Rp M)</b>		<b>Output</b>	
		<b>APBN</b>	<b>APBN-P</b>	<b>APBN</b>	<b>APBN-P</b>
1	Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga	3.029,15	1.428,46	266.070 SR	127.864 SR
2	Konversi BBM Ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	350	220	40.000 paket	25.000 paket
3	Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	266,53	-	522.616 paket	-
4	Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	82,5	82,5	10.000 paket	10.000 paket
5	Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	8	8	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi
6	Layanan Infrastruktur	55,61	37,55	1 Layanan	1 Layanan
Jumlah		3.791,79	1.776,51		

Realisasi sampai dengan akhir Desember 2020 adalah 97,04% atau sebesar 1,954 triliun rupiah. Persentase realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 96,89 % dan tahun 2018 sebesar 90,32%. ini menjadi hasil yang memuaskan mengingat di situasi pandemi, Ditjen Migas masih bisa berhasil melewatinya selama tahun 2020.

Sementara penyusunan rencana penganggaran 2021 yang menggunakan konsep redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) masih mempertimbangkan situasi pandemi yang terjadi sehingga belanjapun difokuskan pada Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) berbasis pada hasil, serta masih memperhatikan efisiensi belanja yang berorientasi pada percepatan pemulihian ekonomi seperti tahun 2020. Sistem RSPP yang merupakan implementasi dari kebijakan *Money Follow Program* ini diharapkan dapat menguatkan penerapan anggaran berbasis kinerja dan meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Implikasi dengan adanya sistem RSPP ini adalah program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon 1, tetapi mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga dan kegiatan tidak

disusun dengan nomenklatur yang identik dengan Unit Kerja Eselon II tetapi lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran yang bisa bersifat lintas Unit kerja Eselon II dalam unit Eselon I yang sama atau intas unit Eselon I dalam Kementerian/Lembaga yang sama. Keluaran (Output) merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan menjadi :

1. Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu kumpulan atas keluaran (output) Kementerian/Lembaga (Rincian Output - RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/ serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian Output (RO) yaitu Keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/ Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan sistem RSPP ini, Direktorat Jenderal Migas pada tingkat Eselon I termasuk dalam Program Energi dan Ketenagalistrikan serta Dukungan

Tabel 6. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas bumi

No	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	UNIT
1	ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMB, DMO, DME
2	ACA-Perizinan Produk	DMO, DME
3	AEA-Koordinasi	DMB
4	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	DMT
5	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	DMB, DMO, DMT
6	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	DMB, DMT DMT
7	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	DMB, DMO DMO
8	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	DMB
9	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	DMB, DMO, DME, DMT
10	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMB, DMO, DME
11	QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	DMO
<b>Alokasi (Rp)</b>		<b>77.912.783.000</b>

Manajemen. Sedangkan pada Level Eselon II terbagi menjadi 3 Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang terdistribusi ke Direktorat Pembinaan Program (DMB), Direktorat Pembinaan

Usaha Hulu (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO), Direktorat Teknik dan Lingkungan (DME) sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 7. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

No	KRO	UNIT
1	FAG-Pengawasan Pembangunan	DMI
2	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	DMI
3	UAD-Perencanaan dan Penganggaran	DMI
<b>Alokasi (Rp)</b>		<b>1.796.292.858.000</b>

2. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi untuk Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI) dengan KRO dan Anggaran sebagai berikut:

3. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi melekat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Migas (SDM) dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 8. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi

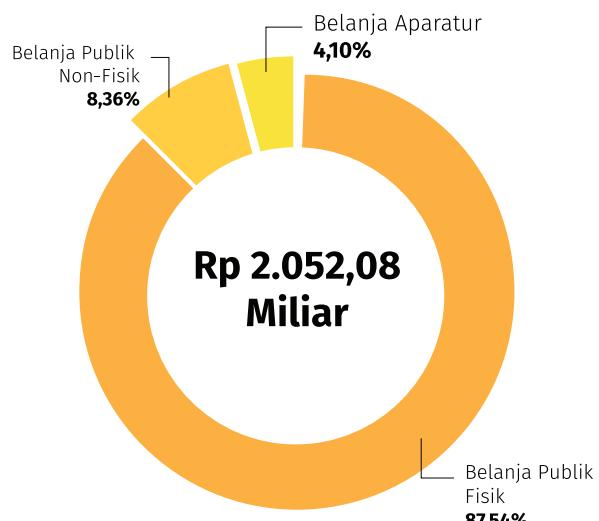
No	KRO	UNIT
1	EAA-Layanan Perkantoran	SDM
2	EAB-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	SDM
3	EAC-Layanan Umum	SDM
4	EAD-Layanan Sarana Internal	SDM
5	EAE-Layanan Prasarana Internal	SDM
6	EAF-Layanan SDM	SDM
7	EAG-Layanan Hukum	SDM
8	EAH-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	SDM
9	EAI-Layanan Kehumasan dan Protokoler	SDM
10	EAJ-Layanan Data dan Informasi	SDM
11	EAL-Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	SDM
12	EAN-Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	SDM
13	FAI-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	SDM
14	PAH-Peraturan lainnya	SDM
<b>Alokasi (Rp)</b>		<b>177.873.781.000</b>

Dalam rangka mendukung pemerintah melalui konsep RSPP diatas, Direktorat Jenderal Migas mengalokasikan anggaran program/kegiatan diutamakan untuk yang memiliki manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, dengan tetap memperhatikan target-target sub sektor minyak dan gas bumi yang telah tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024. Oleh karena itu pada tahun 2021, Ditjen Migas mengalokasikan anggaran pada belanja reguler dan infrastruktur dengan total pagu 2,052 triliun rupiah yang terbagi 1,796 triliun rupiah untuk infrastruktur dan 255,79 miliar rupiah untuk belanja regular. Sedangkan jika alokasi anggaran Ditjen Migas Tahun 2021 berdasarkan penerima manfaatnya terbagi menjadi:

1. Belanja Aparatur : Segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain:

2. Belanja Publik non fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: Pengawasan, Rekonsiliasi data, dan Penyusunan peraturan perundangan
3. Belanja Publik fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain: Pembangunan Jargas, Pembagian Konverter Kit Nelayan dan petani, Konversi Minyak Tanah ke LPG, dan Layanan Infrastruktur

Untuk masing-masing alokasi tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah dengan besaran belanja aparatur sebesar 4,10%, Belanja Publik Non Fisik 8,36%, dan Belanja Publik Fisik sebesar 87,54%.



Grafik 23. Belanja Anggaran TA 2021

Sedangkan porsi anggaran masing-masing unit Eselon II sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut

Tabel 9. Alokasi Anggaran Masing-Masing Eselon 2

No	Unit	Alokasi (Rp Ribu)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	15.990.252
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	30.991.752
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME)	17.667.017
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	13.263.762
5	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur	1.796.292.858
6	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	177.873.781
<b>Total</b>		<b>2.052.079.422</b>

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, Ditjen Migas

mengalokasi anggaran Prioritas Nasional sebesar 1,255 triliun rupiah atau sekitar 61% alokasi Pagu Ditjen Migas sebesar 2,052 triliun.

Tabel 10. Alokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) 2021

No	Unit	Kegiatan PN/Ro	Kro	Indikator	Target 2021
1	DMEW	Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional yang Disiapkan dan Ditetapkan Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional yang Ditawarkan	10 WK 10 WK
2	DMEN	Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang Disiapkan dan Ditetapkan Jumlah Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Ditawarkan	2 WK 2 WK
3	DMOH	Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	7500 ribu ton
4	DMBS	Evaluasi Usulan Ruas Transmisi Trans Kalimantan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Evaluasi Usulan Ruas Transmisi Trans Kalimantan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	1 rekomendasi
5	DMOO	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang 2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan/Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	1 Laporan Monitoring Evaluasi 1 Rekomendasi Kebijakan/Regulasi
6	DMI	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	Jumlah Sambungan Rumah Tangga	120.776 SR
7	DMI	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	Jumlah Paket Konverter Kit untuk Nelayan	28.000 Paket
8	DMI	Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	Jumlah Paket Konverter Kit untuk Petani	28.000 Paket
9	DMI	Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas)	UAD-Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas)	10 Lokasi
10	SDMH	Draft Revisi Undang-Undang Migas	PAH - Peraturan lainnya	Jumlah Draft Revisi Undang-Undang Migas	1 Draft
<b>Alokasi (Rp Triliun)</b>					<b>1,252</b>

# BAB IV

## RENCANA KERJA TAHUNAN 2021



RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2021**

RKT 2021 merupakan penjabaran dan penajaman dari Renstra Ditjen Migas Tahun 2021-2024 dengan mempertimbangkan visi dan misi Presiden serta evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019. Dalam

rangka mendukung hal-hal tersebut di atas, target-target di dalam RKT Ditjen Migas tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 sebagai berikut :

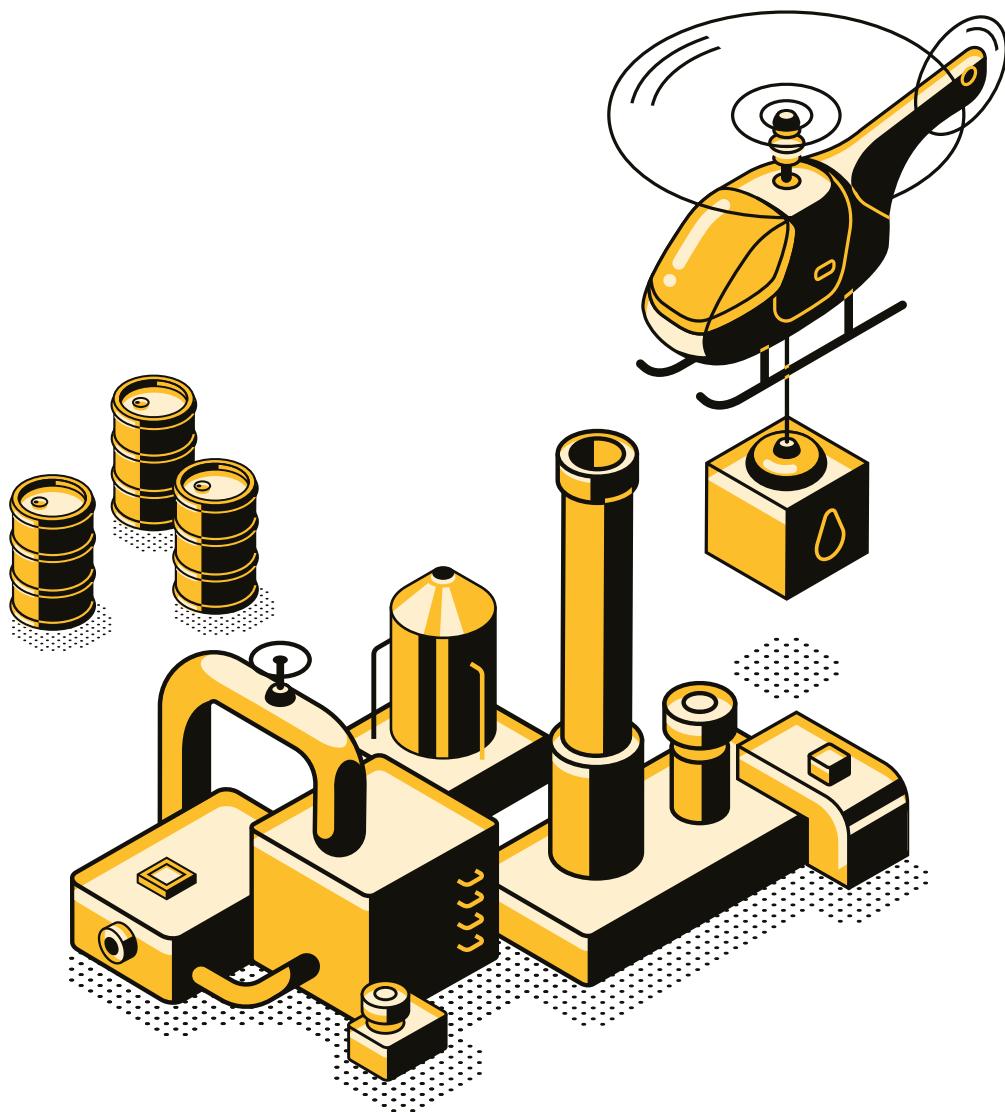
Tabel 11. Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas Tahun 2021

<b>Sasaran Program</b>	<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥1)	Indeks	1
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	91,75
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	75
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	61
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	77
	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	87
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	7	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	76,5
	8	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,3
	9	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	82,5
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	10	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	88
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	11	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,25
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	78,5
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	80
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,27

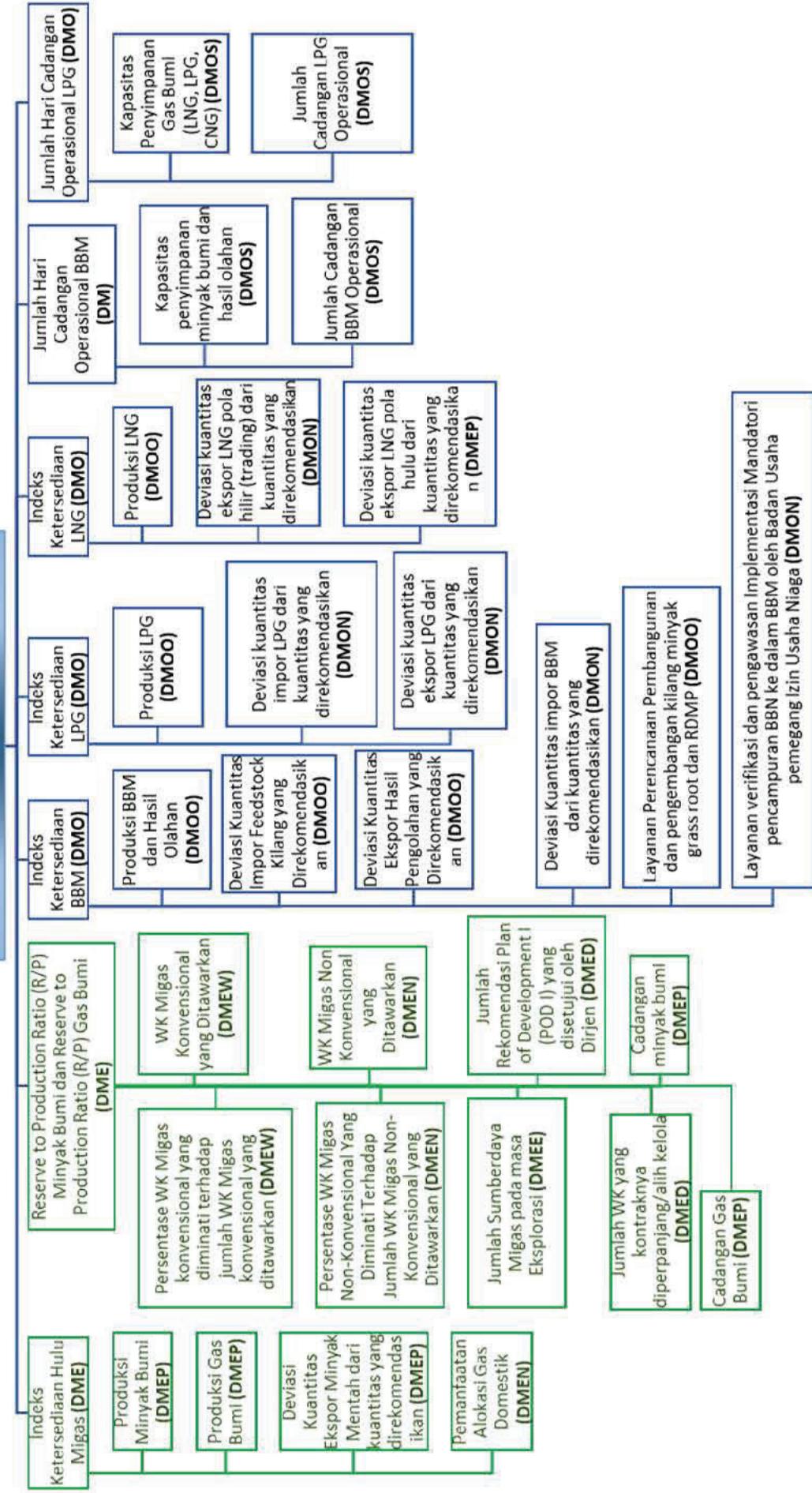
## 4.1 INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS

Indeks Ketersediaan Migas (*Availability*) merupakan Indeks yang menunjukkan kemampuan dalam menyediakan sumber minyak dan gas bumi secara nasional baik penyediaan disektor hulu maupun dihilir. Fokus utama penyediaan migas adalah dengan meningkatkan produksi migas di hulu dan meningkatkan cadangan migas melalui penandatanganan wilayah kerja baru sehingga dapat meningkatkan *Reserve to Production Ratio* (R/P). Sedangkan di hilir meningkatkan jumlah hari cadangan operasional BBM dan LPG dan optimalisasi kilang BBM beserta hasil olahan.

Indeks ketersediaan Migas didukung oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME) dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO). Indeks Ketersediaan Migas Memiliki sasaran terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Ketersediaan Migas ditopang oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 1 berikut :



## IICSP 1: INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS



Bagan 1. Indikator Pendukung Indeks Ketersediaan Migas

## 4.2 AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN

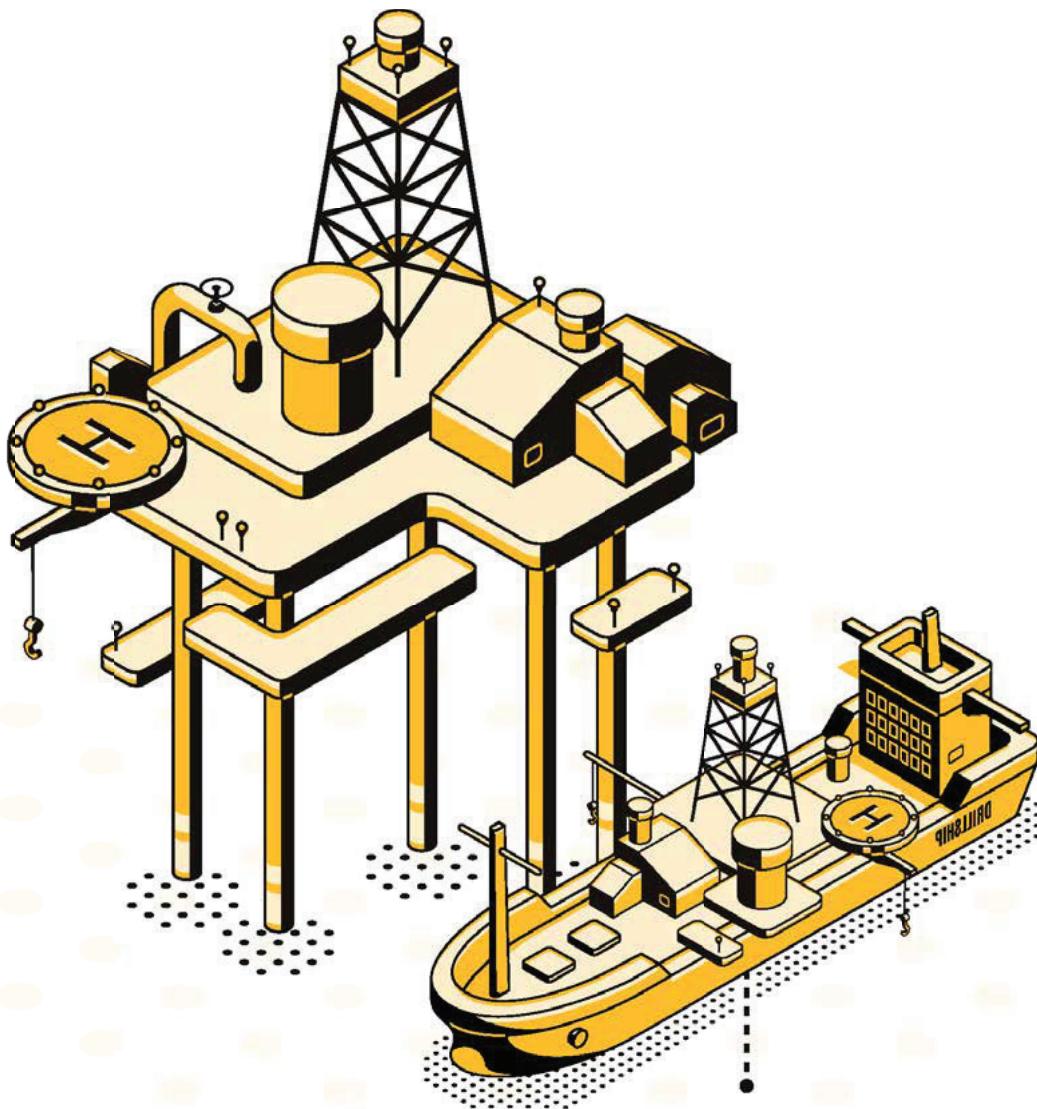
Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan merupakan Indikator yang menunjukkan ketepatan formulasi harga migas yang dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Kriteria Harga Migas yang Ideal ialah ketika harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada Peraturan Perundungan yang berlaku. Keterjangkauan (Affordability) merupakan hal mendasar dalam pelayanan energi, bahwa dibutuhkan harga bahan bakar energi yang terjangkau dan stabil agar perekonomian nasional tetap terjaga. Harga gas baik di hulu dan hilir beserta harga BBM menjadi faktor dalam penentuan keterjangkauan migas. Dengan terjangkaunya

harga energi menjadikan masyarakat sanggup dan mampu dalam menyediakan sumber energinya.

Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan didukung oleh 3 (tiga) Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan memiliki sasaran terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Ketersediaan Migas ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 2 berikut :



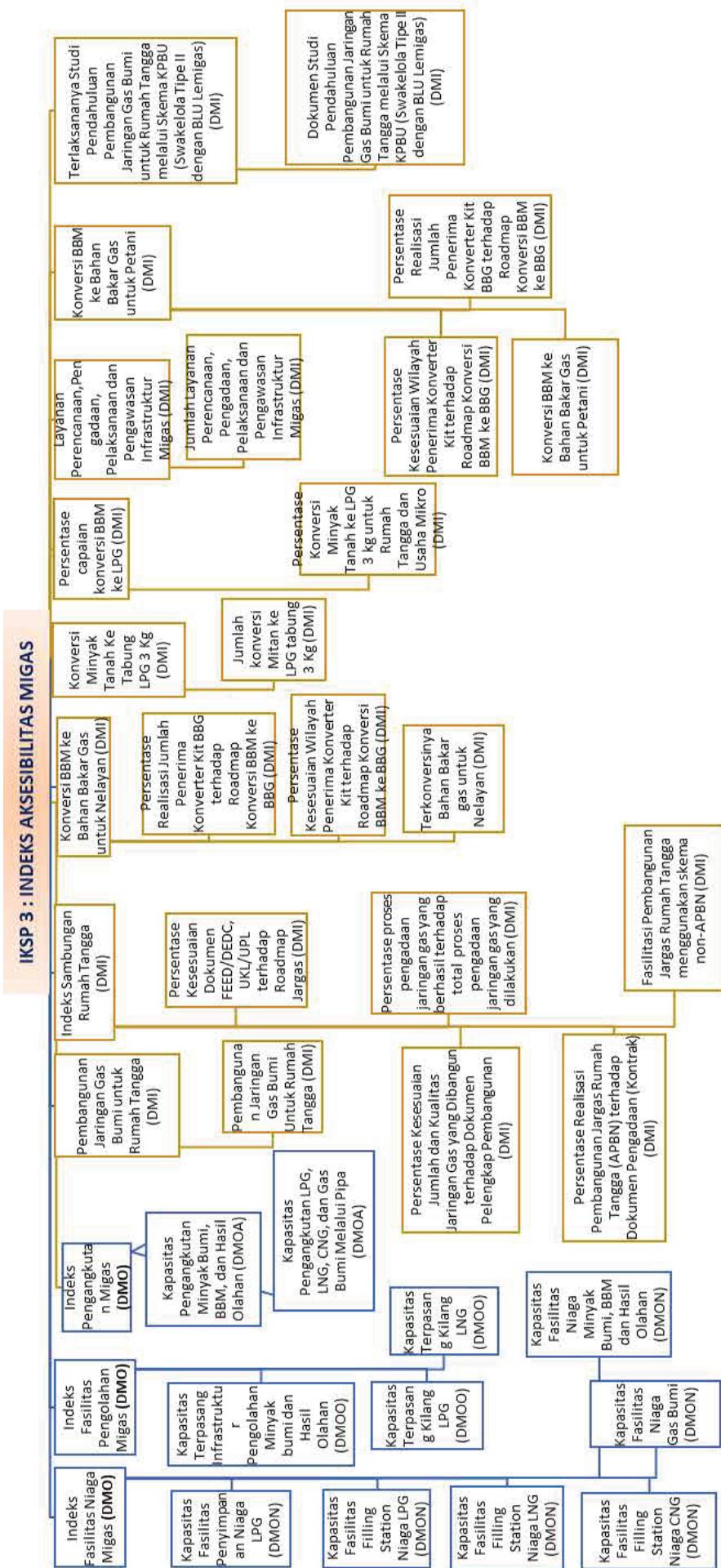
Bagan 2. Indikator Pendukung Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan



## 4.3 INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS

Indeks Aksesibilitas Migas (Accessibility) adalah Indeks yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah ditekankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses migas melalui pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan sumber energi migas. Rendahnya akses terhadap energi membuat masyarakat di negara kita kehilangan kesempatan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Sehingga peningkatan akses energi dalam hal ini migas membutuhkan perencanaan yang koheren, kerangka kebijakan dan institusi serta tata kelola yang handal dan akuntabel, pendanaan yang terencana, serta partisipasi berbagai pihak, pelaku, penerima manfaat, dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mensinergikan

peningkatan akses energi bagi masyarakat dengan berbagai agenda pembangunan dan ekonomi. Fokus Pemerintah dalam rangka medukung aksesibilitas migas tahun 2021 yaitu penyediaan Infrastruktur migas melalui pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga, Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani, dan peningkatan fasilitas hilir migas. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO) dan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI). Indeks Aksesibilitas Migas memiliki sasaran Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Aksesibilitas Migas ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 3 berikut :



Bagan 3. Indikator Pendukung Indeks Aksesibilitas Migas

## 4.4 PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas merupakan Indikator yang menunjukkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas

Indikator tersebut didukung oleh Direktorat Pembinaan Program (DMB). Indikator ini

memiliki sasaran Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan didukung oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut:



Bagan 4. Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

## 4.5 PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas adalah Indikator yang menunjukkan realisasi investasi sub sektor migas terhadap perencanaan yang sudah disusun serta sebagai bahan analisa untuk mengevaluasi iklim investasi migas. Indeks Pengelolaan Energi Migas berada pada

Direktorat Pembinaan Program Migas (DMB). Indeks Pengelolaan Energi Migas memiliki sasaran Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Migas yang Bersinergi. Indikator ini ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 5 berikut :



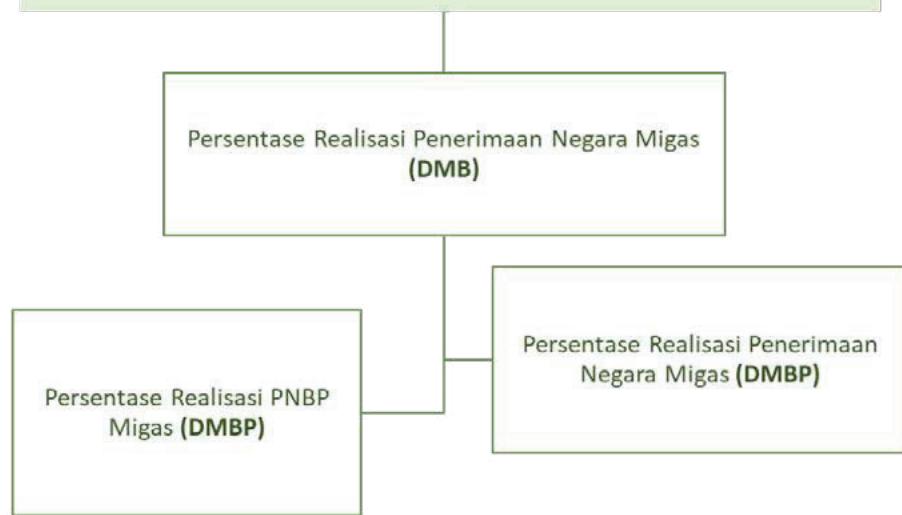
Bagan 5. Indikator Pendukung Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

## 4.6 PERSENTASE REALISASI PNBP MIGAS

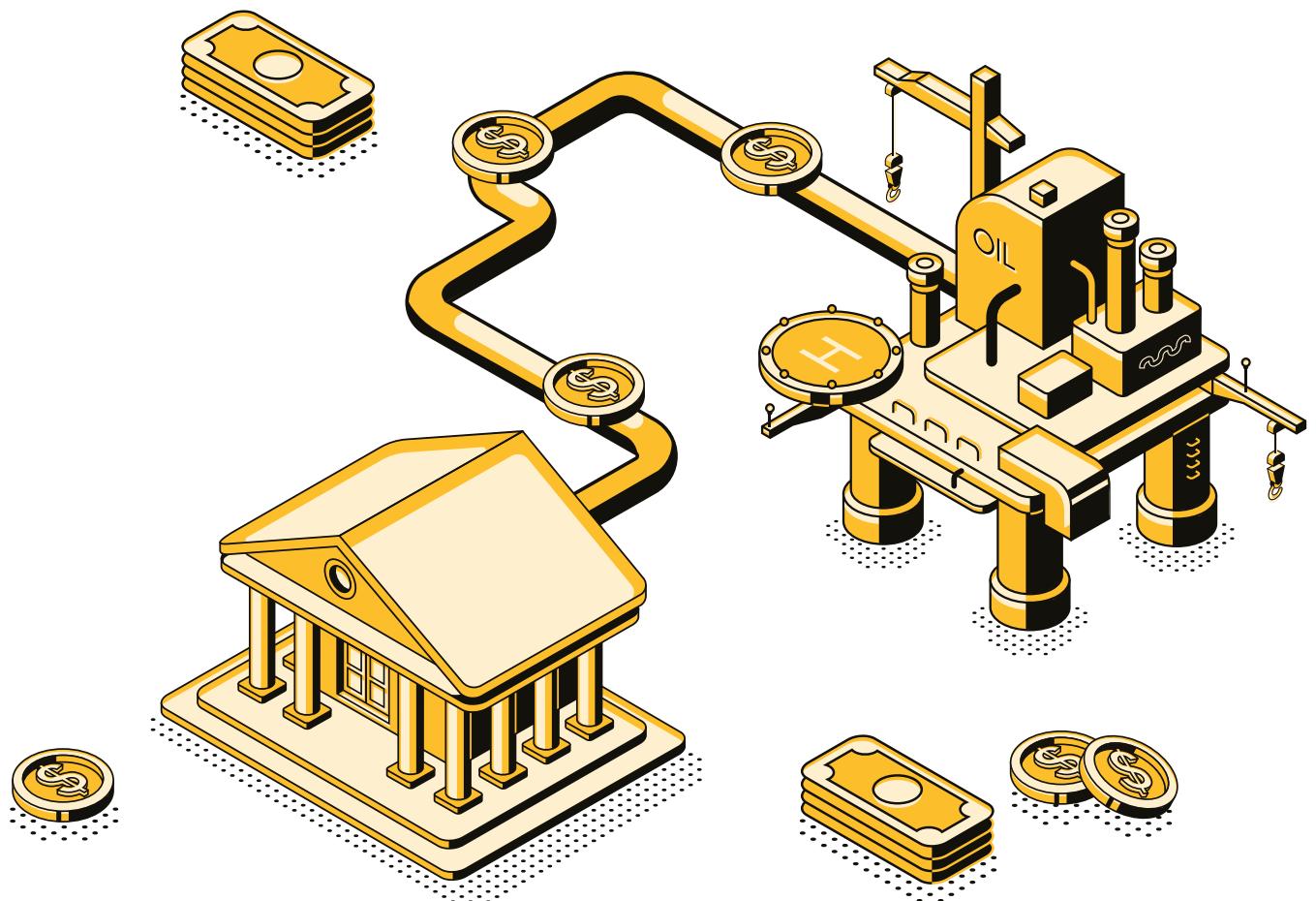
Persentase Realisasi PNBP Migas adalah Indikator yang menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara sub sektor migas. Penilaian persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan Realisasi PNBP Sub Sektor Migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

Persentase Realisasi PNBP Migas berada pada Direktorat Pembinaan Program (DMB). Indikator ini memiliki sasaran Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelaanjutan. Indikator ini ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana Bagan 6 berikut :

## IKSP 6 : PERSENTASE REALISASI PNBP SUBSEKTOR MIGAS



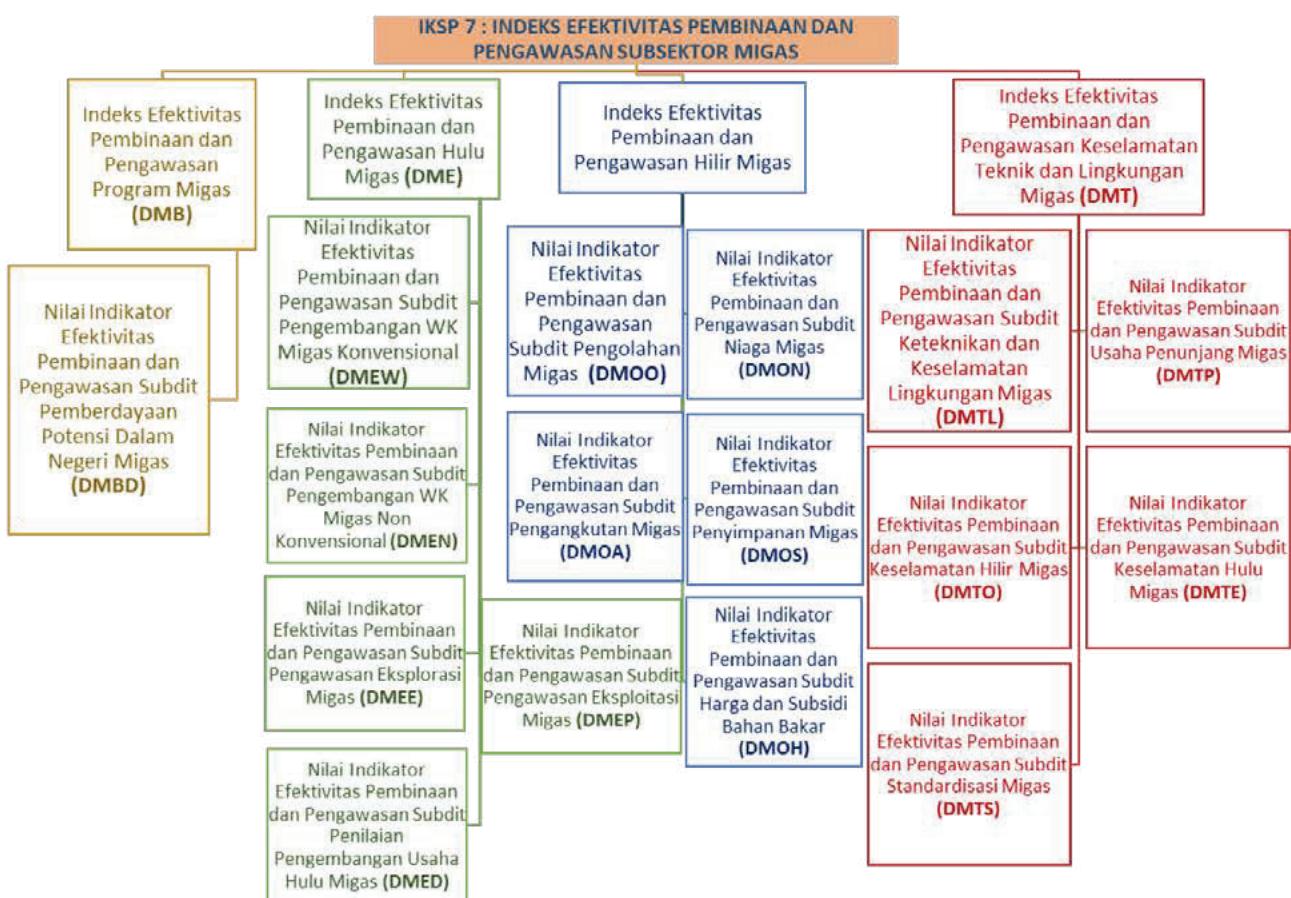
Bagan 6. Indikator Pendukung Persentase Realisasi PNBP Migas



## 4.7 INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan bagi internal maupun layanan publik.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut :

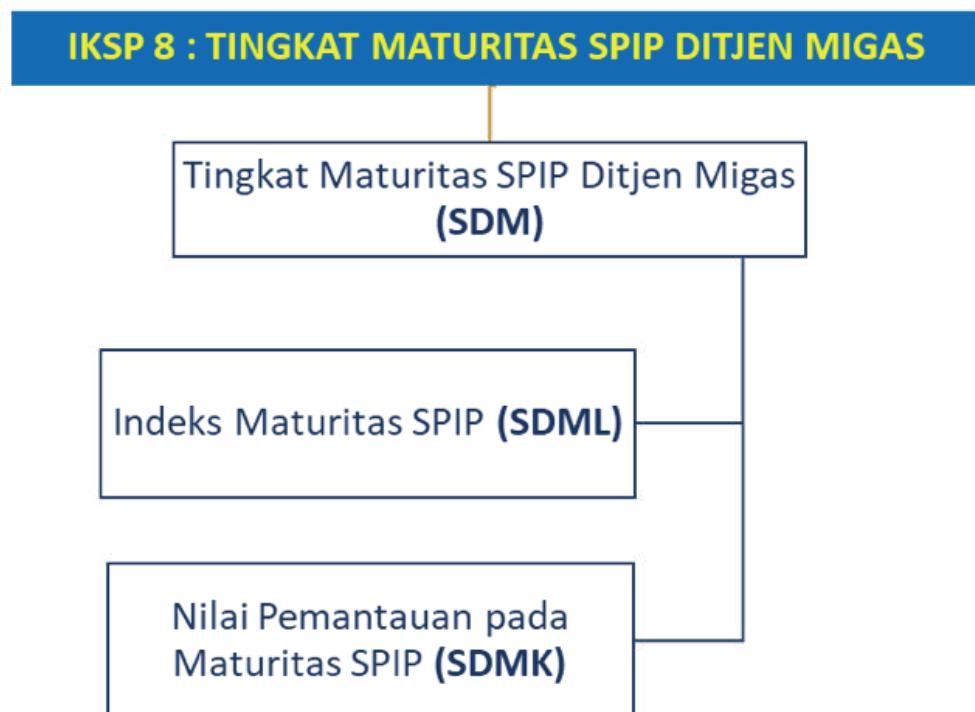


Bagan 7. Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

## 4.8 TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas menunjukkan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko,

Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang didukung oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut :



Bagan 8. Indikator Pendukung Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas

## 4.9 NILAI SAKIP DITJEN MIGAS

Nilai SAKIP Ditjen Migas merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian atas SAKIP mencakup unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran

Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Nilai SAKIP Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut :



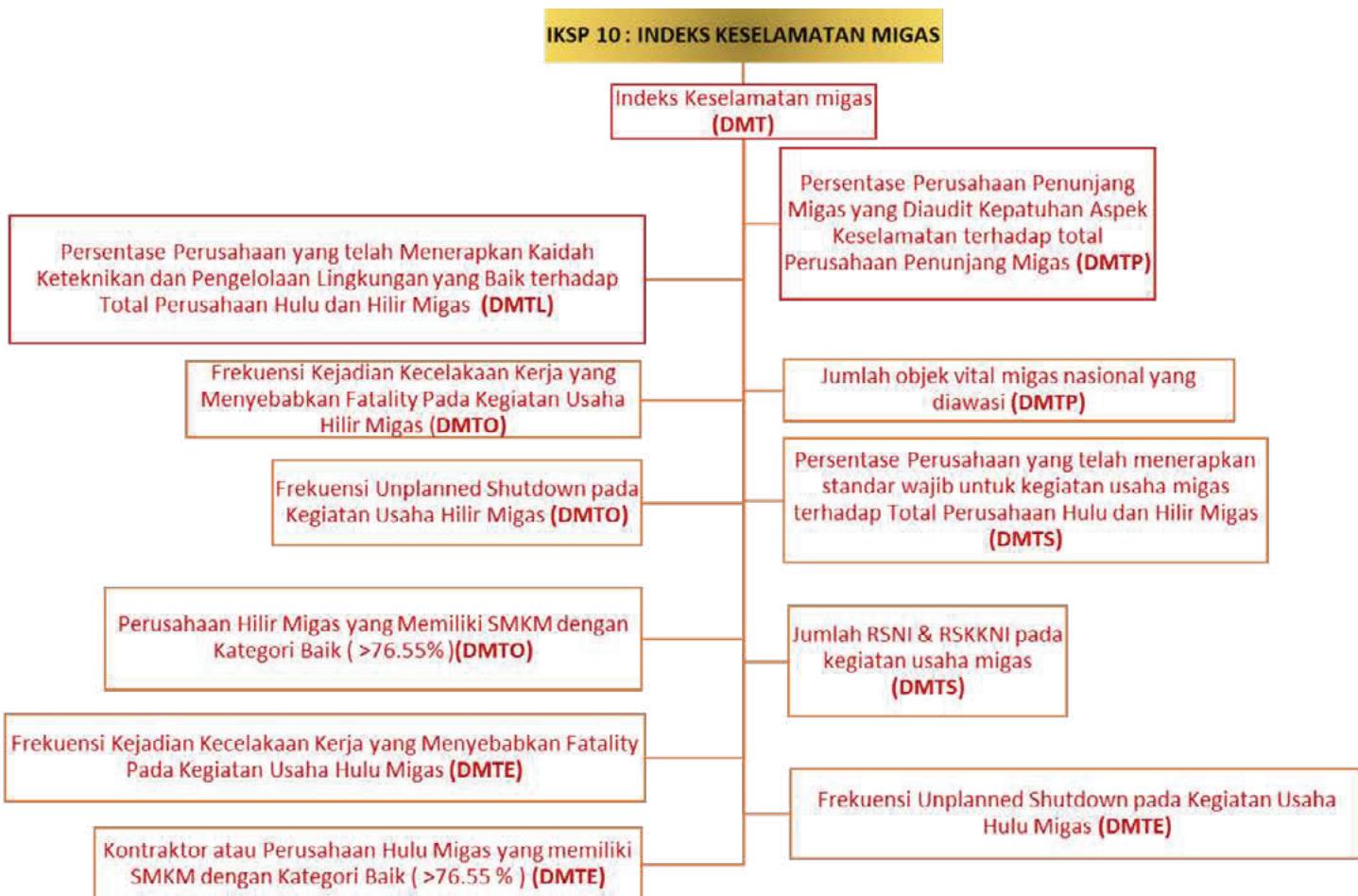
Bagan 9. Indikator Pendukung Nilai SAKIP Ditjen Migas

## 4.10 INDEKS KESELAMATAN MIGAS

Indeks Keselamatan migas merupakan indeks yang menunjukkan tingkat penerapan sistem manajemen keselamatan Migas baik di hulu maupun di hilir melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu dan hilir Migas. Dalam hal ini Pemerintah terus mendorong usaha migas sesuai dengan kaidah keselamatan sehingga pembinaan dan pengawasan

yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat memberikan hasil yang optimal.

Indeks Keselamatan migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT). Indeks ini memiliki sasaran Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut :



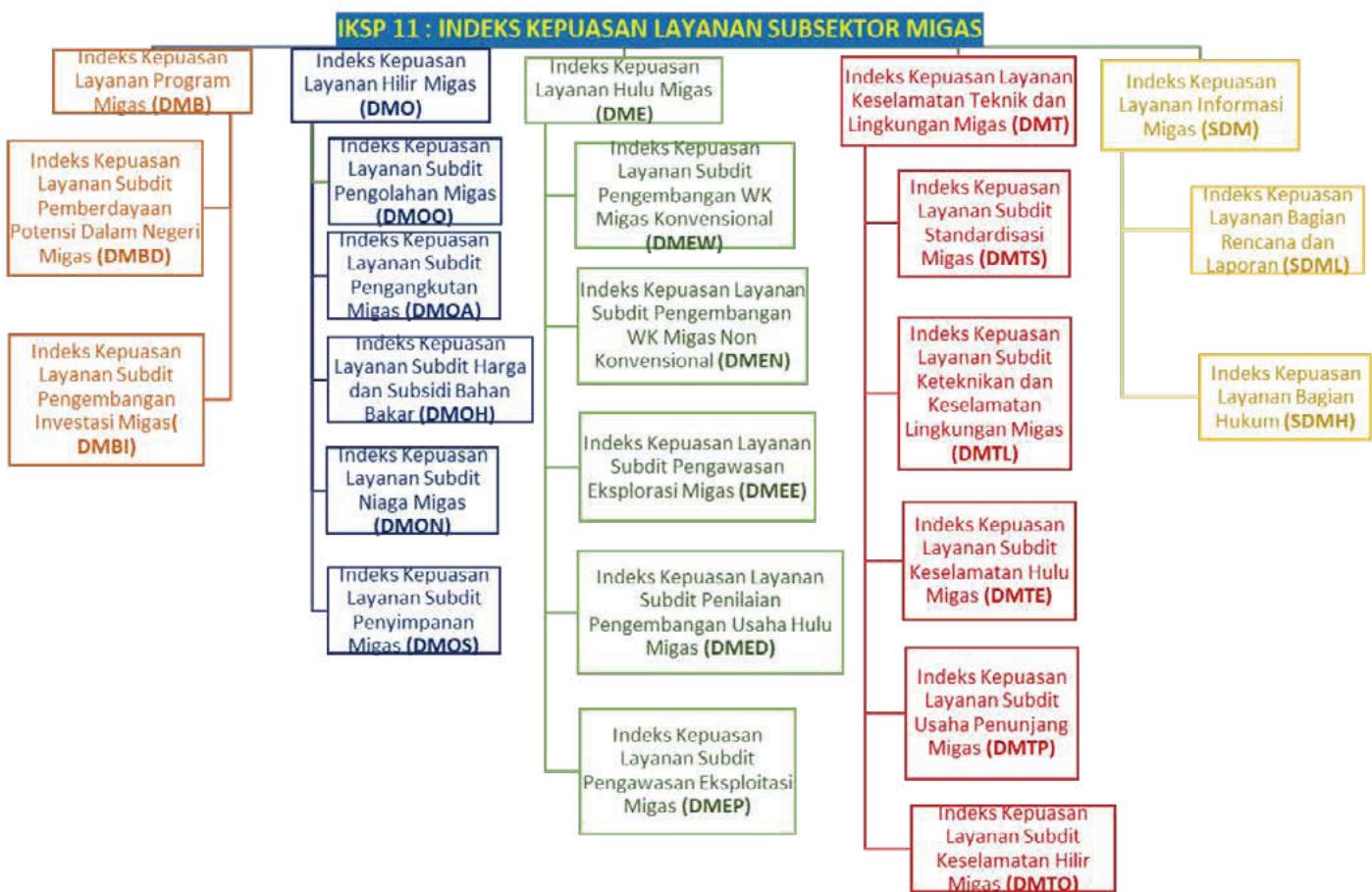
Bagan 10. Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

## 4.11 INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas merupakan Indikator yang mengukur diskrepansi atau gap antara ekspektasi atau harapan pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan.

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas (SDM),

Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT), Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Indeks ini memiliki sasaran Penguatan Kapasitas Organisasi Ditjen Migas yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut :

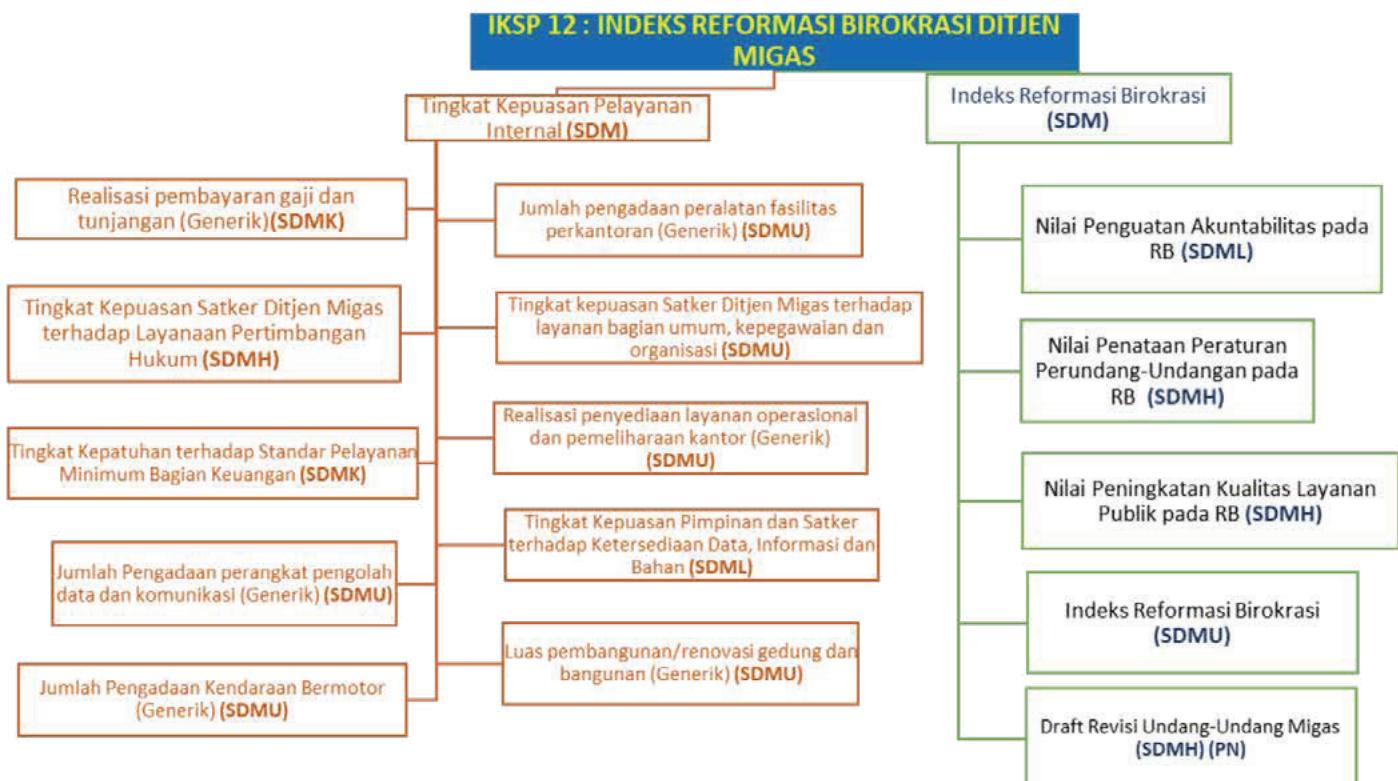


Bagan 11. Indikator Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

## 4.12 INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN MIGAS

Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan Indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi pada Layanan Prima yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut :



Bagan 12. Indikator Pendukung Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

## 4.13 NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada

di Sekretariat Ditjen Migas. Indikator ini memiliki sasaran Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut :



Bagan 13. Indikator Pendukung Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

## 4.14 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai ASN, dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan Instrumen kontrol sosial agar ASN selalu

bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

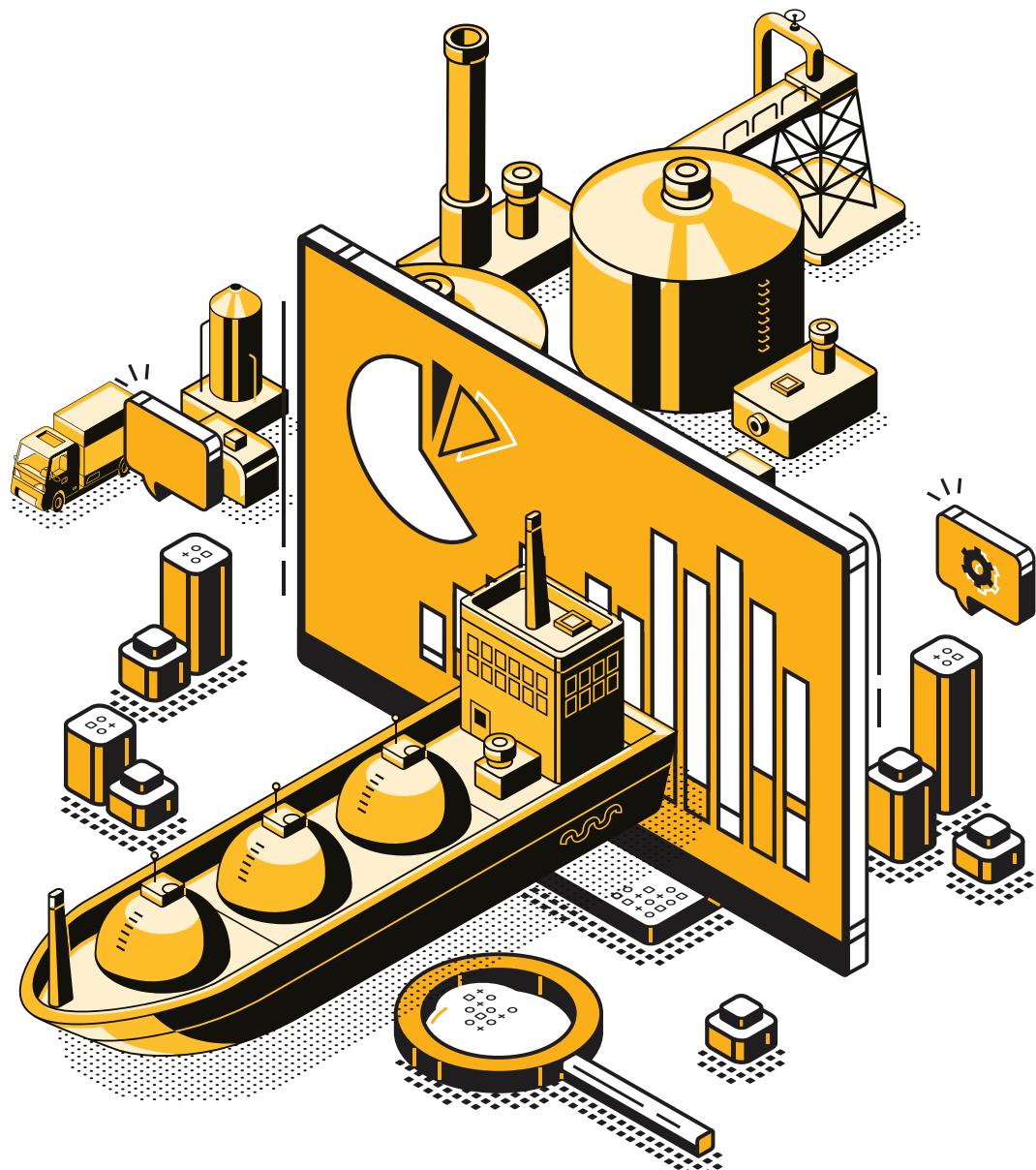
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan 14 :

## 4.15 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN MIGAS

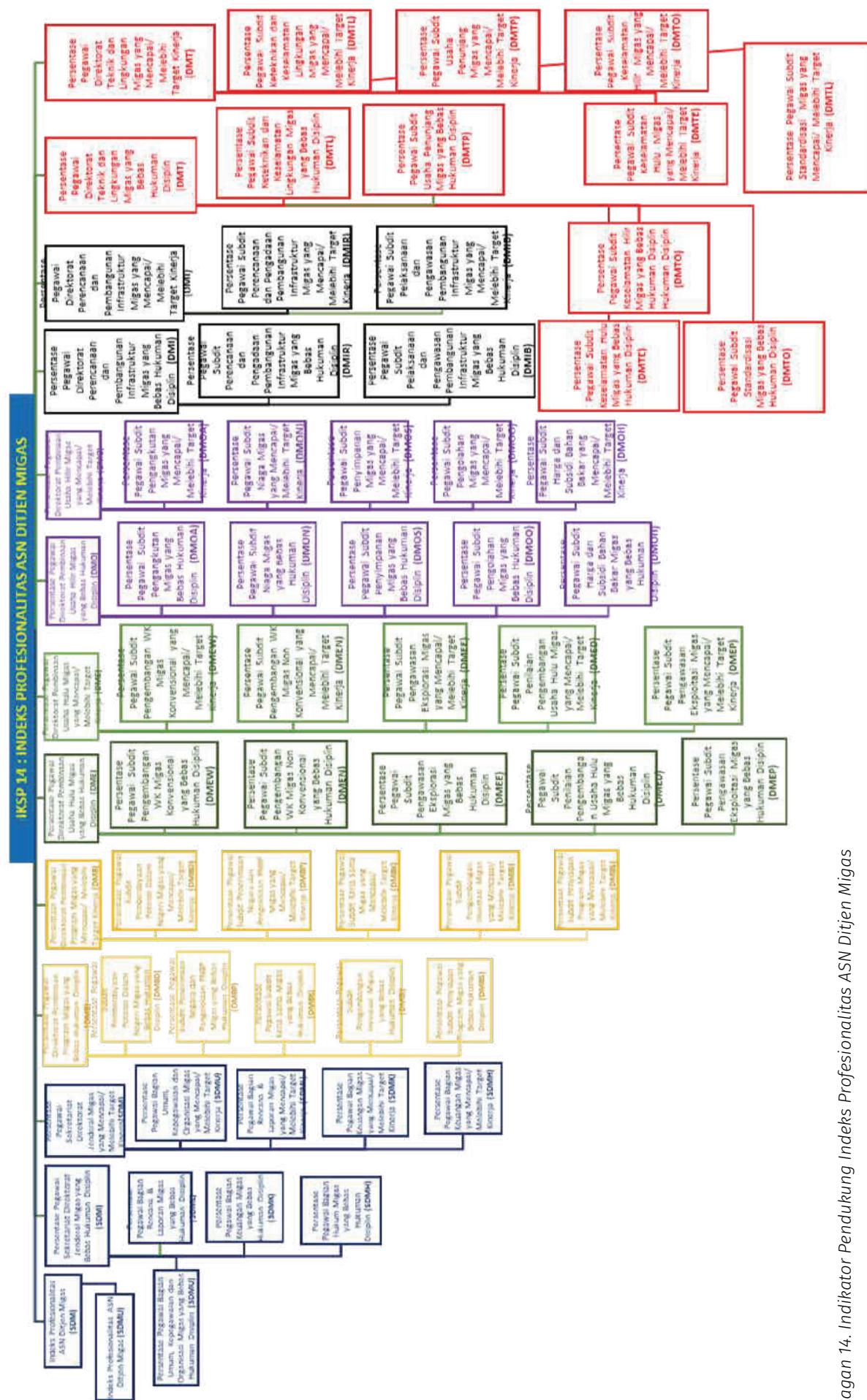
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian output dan outcome berupa kelancaran pelaksanaan anggaran,

mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.

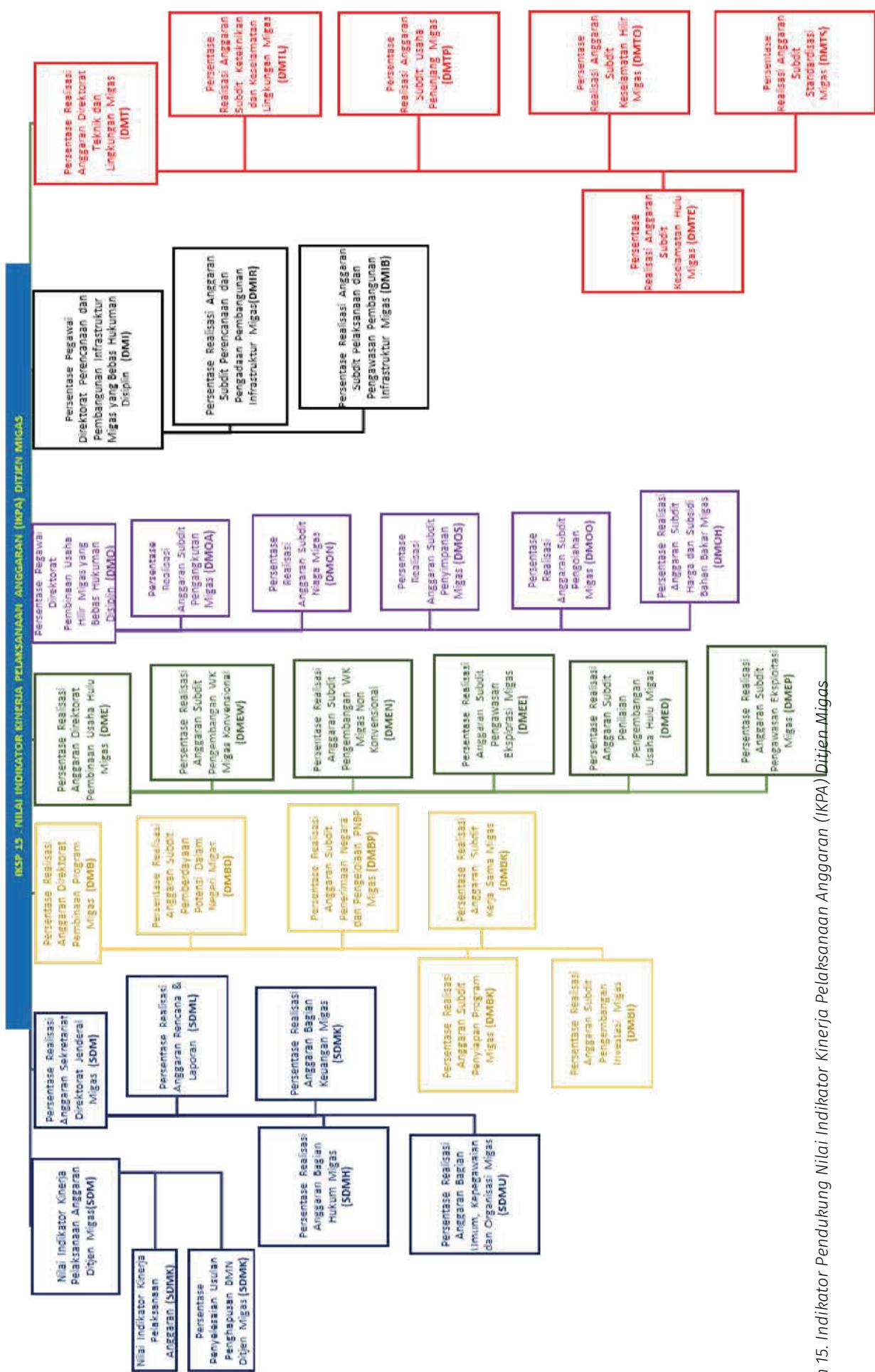
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan 15 berikut :



#### 4. RENCANA KERJA TAHUNAN 2021



Bagan 14. Indikator Pendukung Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas



Bagan 15. Indikator Pendukung Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas

# BAB IV

## INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)



RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2021**

## 5.1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

### 1. PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

#### 1.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS

Tabel 12. Indeks Ketersediaan Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Tersedianya Pasokan Hulu Migas Sesuai Kebutuhan	1	Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks Skala $\geq 1$	1	DME
	Terjaminnya Pasokan Hulu Migas yang Berkelanjutan	2	Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi	Tahun	7,41/17,14	DME
	Tersedianya Pasokan Hilir Migas sesuai kebutuhan	3	Indeks Ketersediaan BBM	Indeks Skala $\geq 1$	1	DMO
		4	Indeks Ketersediaan LPG	Indeks Skala $\geq 1$	1	DMO
		5	Indeks Ketersediaan LNG	Indeks Skala $\geq 1$	1	DMO
		6	Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Ribu Ton	7500	DMO
		7	Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23	DMO
		8	Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional	Hari	14	DMO
	Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Program Migas yang Berkualitas	9	Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima Oleh Stakeholder	%	82	DMB

**■ 1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA: AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN**

Tabel 13. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
634.8-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Minyak Mentah	1	Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%	5	DMB
	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Gas dan LNG Skema Hulu	2	Percentase Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa,LNG, LPG dan Gas Suar)	%	0	DME
	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Migas Hilir	3	Percentase Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%	0	DMO
		4	Percentase Deviasi Harga Gas Hilir	%	28	DMO

## ■ 1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS

Tabel 14. Indeks Aksesibilitas Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Tersedianya fasilitas Niaga, Pengangkutan, Pengolahan, dan Penyimpanan sesuai kebutuhan	1	Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks Skala 100	100	DMO
		2	Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks Skala 100	100	DMO
		3	Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks Skala 100	59	DMO
		4	Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks Skala 100	100	DMO
	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	5	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	Tahapan	Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	DMO
	Tersedianya Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg untuk daerah yang belum terkonversi	6	Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kgz	Paket	0	DMI
	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan	7	Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket	28000	DMI
	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani	8	Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket	28000	DMI
	Tersedianya Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga sesuai dengan Roadmap	9	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR	120776	DMI
	Terlaksananya Studi Penduluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	10	Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Lokasi	10	DMI

## 5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

### ■ 1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA: PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Tabel 15. Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon
					2021	II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Optimalnya Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Migas	1	Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	61	DMB

### ■ 1.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA: PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS

Tabel 16. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon
					2021	II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Migas untuk memberi nilai tambah dan efek pengganda bagi perekonomian nasional	1	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	77	DMB

### ■ 1.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA: PERSENTASE REALISASI PNBP MIGAS

Tabel 17. Persentase Realisasi PNBP Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon
					2021	II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Migas untuk memberi nilai tambah dan efek pengganda bagi perekonomian nasional	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	87	DMB

## ■ 1.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS

Tabel 18. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Program Migas	1	Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Indeks Skala 4	3,25	DMB
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hilir Migas	2	Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Indeks Skala 4	3,25	DMO
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hulu Migas	3	Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Indeks Skala 4	3,25	DME
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas	4	Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas	Indeks Skala 4	3,25	DMT

## ■ 1.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA:

### INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS

Tabel 19. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas	1	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas	Indeks Skala 100	76,5	DMB
	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	2	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	Indeks Skala 100	76,5	DME
	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	3	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	Indeks Skala 100	76,5	DMO
	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Migas	4	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas	Indeks Skala 100	76,5	DMT

## ■ 1.9 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS KESELAMATAN MIGAS

Tabel 20. Indeks Keselamatan migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan	1	Indeks Keselamatan migas	Indeks Skala 100	88	DMT

## 5.2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

### 2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

#### ■ 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Tabel 21. Indeks Reformasi Birokrasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
<b>1896-Pengelolaan Manajemen Keselektarianan Bidang Minyak dan Gas Bumi</b>	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Skala 100	78,5	SDM
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Ditjen Migas	2	Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	%	77	SDM

#### ■ 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA: NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS

Tabel 22. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
<b>1896-Pengelolaan Manajemen Keselektarianan Bidang Minyak dan Gas Bumi</b>	Terwujudnya Organisasi Ditjen Migas yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	1	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	SDM

## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS

Tabel 23. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
1896-Pengelolaan Manajemen Keselektarianan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Sikap Profesionalitas ASN Ditjen Migas	1	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks Skala 100	80	SDM
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	2	Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	SDM
	Menciptakan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Unggul dan Profesional	3	Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88	SDM
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas	4	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	DMB
	Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Unggul dan Profesional	5	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92	DMB
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	6	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	DME
	Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Unggul dan Profesional	7	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	85	DME
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	8	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	DMO
	Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Unggul dan Profesional	9	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88	DMO
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	10	Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	DMI
	Menciptakan Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Unggul dan Profesional	11	Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	85	DMI
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	12	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	DMT
	Menciptakan Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Unggul dan Profesional	13	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	91	DMT

## 5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

### ■ 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA: NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Tabel 24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
<b>1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi</b>	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Migas	Nilai	90,27	SDM
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas sesuai Perencanaan	2	Percentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	%	95	SDM
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas sesuai Perencanaan	3	Percentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	%	95	DMB
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas sesuai Perencanaan	4	Percentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	%	95	DME
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas sesuai Perencanaan	5	Percentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	%	95	DMO
	Percentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	6	Percentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	%	95	DMI
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas sesuai Perencanaan	7	Percentase Realisasi Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	%	95	DMT

### ■ 2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS

Tabel 25.Indeks Maturitas SPIP Ditjen Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
<b>Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi</b>	Terwujudnya Pengendalian Intern yang berkelanjutan dan terintegrasi berbasis IT	10	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level Skala 5	3,30	SDM

## ■ 2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA: NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) DITJEN MIGAS

Tabel 26. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
1896-Pengelolaan Manajemen Resekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Implementasi SAKIP Ditjen Migas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	11	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82,50	SDM

## ■ 2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS

Tabel 27. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Eselon II
					2021	
1896-Pengelolaan Manajemen Resekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Informasi Migas	1	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	Indeks Skala 4	3,25	SDM

### 5.3. INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)

#### 3. PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	E II	E III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
1	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMBS	013-Pengawasan dan Penyajian Program Minyak dan Gas Bumi	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Tata Kelola Migas	Jumlah Rekomendasi	2	
			DMBS	013-Pengawasan dan Penyajian Program Minyak dan Gas Bumi	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigasan	Jumlah Dokumen	2	
			DMBS	005-Penilaian dan Penandasan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	3	Jumlah Penandasan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Jumlah Penandasan	60	
			DMBP	008-Formulasi Harga Minyak Mentah	4	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) yang disetujui oleh Dirjen	%	100	
			DMBP	010-Pembinaan, Pengawasan dan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Migas	5	Persentase Realisasi PNBP Migas	%	87	
			DMBP	010-Pembinaan, Pengawasan dan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Migas	6	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	87	
			DMON	009-Koordinasi dan Evaluasi usulan dan/atau reviu Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri	7	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Gas Hilir yang Disetujui oleh Dirjen	%	100	
			DMO	011-Penyajian, Perentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Harga dan Subsidi Bahan Bakar	8	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan LPG yang Disetujui oleh Dirjen	%	100	

Tabel 28. Indikator Kinerja Klasifikasi Rincian Output (IKRO) pada Program Energi dan Ketenagalistrikan

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
			DMEN	006-Penilaian, Penetapan, serta Monitoring Alokasi Gas Bumi Indonesia	9	Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	%		65
			DMEN	007-Penilaian, Penetapan, serta Monitoring Harga Gas Bumi Indonesia	10	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Gas Skema Hulu yang Disetujui oleh Dirjen (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%		100
			DMEE	012-Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksplorasi Migas	11	Jumlah Sumberdaya Migas pada masa Eksplorasi	BBOE		70
			DMED	001-Pembinaan dan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi	12	Jumlah Rekomendasi POD 1 yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah Rekomendasi		2
			DME	014-Pembinaan dan Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	13	Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah Evaluasi		2
			DMED	002-Pembinaan dan Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	14	Jumlah WK yang diperpanjang/ alih ketola kontraknya	Jumlah WK		2
			DMEP	003-Evaluasi Pelaporan Data Cadangan Migas	15	Jumlah Cadangan minyak bumi	MMSTB		1936
			DMEP	003-Evaluasi Pelaporan Data Cadangan Migas	16	Jumlah Cadangan Gas Bumi	TCF		45
			DMEP	004-Optimalisasi Rasio Produksi terhadap Cadangan Minyak dan Gas Bumi	17	Produksi Minyak Bumi	MBOPD		716
			DMEP	004-Optimalisasi Rasio Produksi terhadap Cadangan Minyak dan Gas Bumi	18	Produksi Gas Bumi	MBOEPD		1.261

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
2	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	ACA-Perizinan Produk	DMOO	006-Evaluasi Perizinan Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	1	Percentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pengolahan Migas	%	85	
			DMON	004-Evaluasi Perizinan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	2	Percentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Niaga Migas	%	85	
			DMOA	005-Evaluasi Perizinan Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	3	Percentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pengangkutan Migas	%	85	
			DMOS	003-Evaluasi Perizinan Kegiatan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	4	Percentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas	%	85	
			DMOO	007-Evaluasi Teknis Verifikasi Rekomendasi Eksport/Impor Hasil Pengolahan Migas	5	Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk Feedstock Kilang dari kuantitas yang Direkomendasikan	%	27	
			DMOO	007-Evaluasi Teknis Verifikasi Rekomendasi Eksport/Impor Hasil Pengolahan Migas	6	Deviasi Kuantitas Eksport Hasil Pengolahan yang Direkomendasikan	%	11	
			DMEP	001-Pengawasan Eksport Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Pengawasan Pergerakan Data Eksplorasi Hulu Migas	7	Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari kuantitas yang Direkomendasikan	%	15	
			DMEP	001-Pengawasan Eksport Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Pengawasan Pergerakan Data Eksplorasi Hulu Migas	8	Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari kuantitas yang direkomendasikan	%	14	
			DMED	002-Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Wilayah Kerja Migas	9	Percentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pemanfaatan Data untuk PI 10%	%	85	
			DMED	002-Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Wilayah Kerja Migas	10	Percentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pemanfaatan Data untuk WK Pengembangan	%	85	

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
3	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	AEA-Koordinasi	DMB	DMBK	001-Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral Minyak dan Gas Bumi	1	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas	Jumlah Kejasaama	20
4	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	DMT	DMTS	001-Penyediaan RSNI dan RSKKNI untuk Kegiatan Usaha Migas	1	Jumlah RSNI dan RSKKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	7
5	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BAC-Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha	DMB	DMBP	004-Evaluasi Layanan Program Minyak dan Gas Bumi	1	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas	Indeks	3,25
			DMB	DMBP	004-Evaluasi Layanan Program Minyak dan Gas Bumi	2	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan Investasi Migas	Indeks	3,25
			DMOO		003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	3	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengolahan Migas	Indeks	3,25
			DMOO		003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	4	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengangkutan Migas	Indeks	3,25
			DMO		003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	5	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar	Indeks	3,25
			DMOO		003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	6	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Niaga Migas	Indeks	3,25
			DMOO		003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	7	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Penyimpanan Migas	Indeks	3,25

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
		DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	8	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	Indeks	Indeks	Indeks	3,25
		DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	9	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	Indeks	Indeks	Indeks	3,25
	<b>DME</b>	DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	10	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	Indeks	Indeks	Indeks	3,25
		DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	11	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	Indeks	Indeks	Indeks	3,25
		DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	12	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	Indeks	Indeks	Indeks	3,25
		DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	13	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Standardisasi Migas	Indeks	Indeks	Indeks	3,25
		DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	14	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas	Indeks	Indeks	Indeks	3,25
	<b>DMT</b>	DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	15	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keselamatan Hulu Migas	Indeks	Indeks	Indeks	3,25
		DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	16	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Usaha Penunjang Migas	Indeks	Indeks	Indeks	3,25
		DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	17	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keselamatan Hilir Migas	Indeks	Indeks	Indeks	3,25

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target
									2021
6	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	DMBD	002-Fasilitasi dan Pembinaan Barang Operasi	1	Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah Perusahaan	101	
		DMB	DMBI	001-Fasilitasi Pembinaan Publik SKUP	2	Percentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit	%	91	
		DMTL	DMTP	003-Pembinaan pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan Minyak dan Gas Bumi	3	Percentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	3,52	
		DMT	DMTP	004-Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang dan Inspeksi (PI) Minyak dan Gas Bumi	4	Percentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap total Perusahaan Penunjang Migas	%	5	
		DMTO	DMTP	004-Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang dan Inspeksi (PI) Minyak dan Gas Bumi	5	Jumlah objek vital migas nasional yang diawasi	Jumlah Ovitnas	40	
		DMTO	DMTO	005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	6	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	
		DMTO	DMTO	005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	7	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	
		DMTO	DMTO	005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	8	Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah Perusahaan	14	

## 5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target
									2021
			DMTE		006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	9	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	5
			DMTE		006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	10	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	35
		<b>DMT</b>	DMTE		006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	11	Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang memiliki SMKM dengan Kategori Baik (>76,55 % )	Jumlah Perusahaan	6
			DMTS		007-Pengawasan Penerapan Standardisasi Teknis pada Kegiatan Usaha Migas	12	Persentase Perusahaan yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	20
<b>6348-</b> <b>7</b>	<b>BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>DMB</b>	DMBD		003-Pengendalian dan Pengawasan Barang Operasi	1	Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	98,46
					003-Pengendalian dan Pengawasan Barang Operasi	2	Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	1,54
			DMOA		001-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Transmisi Pipa Gas	3	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	MMSCFD	100
			DMOH		002-Pengawasan Harga Bahan Bakar Migas	4	Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota Yang Ditetapkan	%	100
<b>6348-</b> <b>8</b>	<b>BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>	<b>DMB</b>	DMBI		001-Pengendalian dan Pengawasan Investasi	1	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	77

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target
									2021
9	6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	DMO	DMON	003-Pengawasan Implementasi Mandatori Pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga	1	Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%	27
				DMON	003-Pengawasan Implementasi Mandatori Pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga	2	Deviasi Kuantitas Eksport BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%	27
				DMON	003-Pengawasan Implementasi Mandatori Pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga	3	Deviasi Kuantitas Impor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	%	17
				DMON	003-Pengawasan Implementasi Mandatori Pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga	4	Deviasi kuantitas eksport LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	%	27
				DMON	003-Pengawasan Implementasi Mandatori Pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga	5	Deviasi Kuantitas Eksport LNG Skema Hilir (Trading) dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%	14
				DMON	003-Pengawasan Implementasi Mandatori Pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga	6	Deviasi realisasi pencampuran BBN jenis Biodiesel terhadap target mandatory pencampuran BBN jenis Biodiesel	%	4
				DMOO	008-Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Pengolahan Migas	7	Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD	767.680
				DMOO	008-Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Pengolahan Migas	8	Produksi LPG	Juta Ton	2
				DMOO	008-Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Pengolahan Migas	9	Produksi LNG	Juta Ton	17

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
		010-Pengawasan Mutu BBM,LPG,BBG dan Pelumas Yang Beredar di Dalam Negeri	DMOO		10	Kapasitas Terpasang Kilang Bbm	RIBU BCPD	1.151,10	
		010-Pengawasan Mutu BBM,LPG,BBG dan Pelumas Yang Beredar di Dalam Negeri	DMOO		11	Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LNG	JUTA TON	31,24	
		010-Pengawasan Mutu BBM,LPG,BBG dan Pelumas Yang Beredar di Dalam Negeri	DMOO		12	Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LPG	JUTA TON	3,88	
		006-Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas	DMOA		13	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	KL	50.000	
		006-Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas	DMOA		14	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG	mton	1.000	
		006-Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas	DMOA		15	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG dan CNG	m3	100	
		011-Post-audit dan monitoring realisasi eksport/ Impor serta penjualan Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga dan/ atau Pengguna Langsung	DMON		16	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG	ton	401	
		012-Supervisi kepatuhan penuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.	DMON		17	Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG	ton/d	820	
		012-Supervisi kepatuhan penuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	DMON		18	Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG	MMSCFD	40	
		012-Supervisi kepatuhan penuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	DMON		19	Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG	MMSCFD	121	
		012-Supervisi kepatuhan penuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	DMON		20	Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi	Km	6.516	

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
		DMON	012-Supervisi kepatuhan pemenuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	21	Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	KL	779.634		
		DMOS	009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	22	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	KL	7045.678		
			009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	23	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG	m3	850.626		
			009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	24	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG	Ton	523.057		
			009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	25	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG	m3	1.005.780		
		DMOS	009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	26	Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23		
		DMOS	009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	27	Jumlah Hari Cadangan Operasional LPG	Hari	14		
<b>DME</b>	DMEE	001-Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksplorasi Migas	28	Percentase KKKS yang diawasi dalam rangka pelaksanaan Komitmen Pasti terhadap jumlah KKKS aktif tahap eksplorasi	%	75,00			
<b>DMB</b>	DMBP	005-Pembinaan dan Pengawasan Program Minyak dan Gas Bumi	29	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas	Nilai	76,50			

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (kRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target
									2021
<b>DMO</b>		004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas	DMOO		30	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengolahan Migas	Nilai	76,50	
					31	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengangkutan Migas	Nilai	76,50	
		004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas			32	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar	Nilai	76,50	
					33	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Niaga Migas	Nilai	76,50	
		004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas			34	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Penyimpanan Migas	Nilai	76,50	
					35	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	Nilai	76,50	
		007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	DMEW		36	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	Nilai	76,50	
					37	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	Nilai	76,50	
		007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas			38	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	Nilai	76,50	

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
					007-Pembinaaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	39	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaaan dan Pengawasan Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	Nilai	76,50
	<b>DMT</b>	DMTL			002-Pembinaaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	40	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaaan dan Pengawasan Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas	Nilai	76,50
					002-Pembinaaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	41	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaaan dan Pengawasan Subdit Usaha Penunjang Migas	Nilai	76,50
					002-Pembinaaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	42	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaaan dan Pengawasan Subdit Keselamatan Hilir Migas	Nilai	76,50
					002-Pembinaaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	43	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaaan dan Pengawasan Subdit Keselamatan Hulu Migas	Nilai	76,50
					002-Pembinaaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	44	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaaan dan Pengawasan Subdit Standardisasi Migas	Nilai	76,50
	<b>6348- 10 Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam</b>	DMEW	DMEW	002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	1	Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional yang Disiapkan dan Ditetapkan	WK	10
			DME	DME	002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	2	Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional yang Ditawarkan	WK	10
			DMEN	DMEN	002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	3	Jumlah Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang Disiapkan dan Ditetapkan	WK	2
			DMEN	DMEN	002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	4	Jumlah Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Ditawarkan	WK	2

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
			DMO	DMOH	001-Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	5	Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Juta MT	7,5
			DMB	DMBS	003-Evaluasi Usulan Ruas Transmisi Trans Kalimantan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	6	Evaluasi Usulan Ruas Transmisi Trans Kalimantan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	Rekomendasi	1
QIA-									
6348-									
11	Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Pengawasan dan Pengendalian Produk [PRIORITAS NASIONAL]	DM00	DM00	001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	1	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	Laporan Monitoring Evaluasi	1
			DMO	DM00	001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan /Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	Laporan Rekomendasi Kebijakan/ Regulasi	1
6349 -									
12	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	FAG-Pengawasan Pembangunan	DML	DML	001-Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	1	Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Laporan	1
			DML	DML	002-Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran	2	Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran	Laporan	1

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
			DMI		004-Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	4	Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Laporan	0
							Percentase Kesesuaian Perencanaan Konversi Mitan ke LPG 3 kg terhadap Roadmap	%	
							Percentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Mitan ke LPG 3 KG	%	100
							Percentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%	100
							Percentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%	100
							Percentase Realisasi Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani	%	100
							Percentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani	%	100
13	6349 - Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	DMI		004-Paket Konversi Mitan ke LPG 3 Kg	1	Percentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Mitan ke LPG 3 KG	%	100
			DMI		004-Paket Konversi Mitan ke LPG 3 Kg	2	Percentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Mitan ke LPG 3 KG	%	100
			DMI		001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	3	Percentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%	100
			DMI		001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	4	Percentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%	100
			DMI		002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	5	Percentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani	%	100
			DMI		002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	6	Percentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani	%	100

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target	
									2021	
DMI	DMI	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	DMI	7	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	8	Percentase Kesesuaian Dokumen FEED/DEDC, Roadmap Jargas	%	100	
		003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	DMI	8	Percentase Pengadaan Jaringan Gas yang Berhasil terhadap Total Pengadaan Jaringan Gas yang Dilakukan		Percentase Kesesuaian Jumlah dan Kualitas Jaringan Gas yang Dibangun terhadap Dokumen Pelengkap Pembangunan	%	100	
		003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	DMI	9	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	10	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBUs)	SR	50000	
		003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	DMI	11	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	12	Percentase Realisasi Pembangunan Jargas Rumah Tangga terhadap Dokumen Pengadaan (Kontrak)	%	100	
		003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	DMI	13	001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	13	Percentase Utilisasi Jargas Rumah Tangga pada Tahun Berjalan	%	100	
		001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	DMI	14	002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	14	Jumlah Paket Konverter Kit untuk Nelayan	Paket	28.000,00	
		002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	DMI	15	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	15	Jumlah Paket Konverter Kit untuk Petani	Paket	28.000,00	
		003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	DMI	16	004-Paket Konversi Minyak ke LPG 3 Kg	16	Jumlah Sambungan Rumah Tangga	SR	120.776	
		004-Paket Konversi Minyak ke LPG 3 Kg	DMI				Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket		
14	6349 - Perencanaan, Pembangunan UAD- dan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	DMI	DMI	DMI	001-Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBUs (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas)	1	Jumlah Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBUs (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas)	Lokasi	10	

Tabel 29. Indikator Kinerja Klasifikasi Rincian Output (IKRO) pada Program Dukungan dan Manajemen

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Out-put (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2021
1	1896 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EAA-Layanan Perkantoran	SDM	SDMK	001-Gaji dan Tunjangan	1	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan <b>(Generik)</b>	%	100
2	1896 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EAB-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	SDM	SDMU	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor <b>(Generik)</b>	%	100
3	1896 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EAC-Layanan Umum	SDM	SDMU	001-Penyusunan rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	1	Tingkat Kepuasan Satker terhadap Bahan Rencana Kerja dan Anggaran	%	84
4	1896 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EAD-Layanan Sarana Internal			001-Layanan Umum dan Perlengkapan dan Rumah Tangga	1	Tingkat kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap layanan bagian umum, kepegawaian dan organisasi	%	77
					001-Pengadaan kendaraan bermotor	1	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor <b>(Generik)</b>	Unit	xx
					003-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi <b>(Generik)</b>	Unit	xx
					002-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	3	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran <b>(Generik)</b>	Unit	xx

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Out-put (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO		Satuan	Target 2021
5	1896 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EAE-Layanan Prasarana Internal	SDMU		001-Pembangunan / renovasi gedung dan bangunan	2	Luas pembangunan/gedung dan bangunan (Generik)	m2	xx	
6	1896 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EAE-Layanan SDM	SDMU		001-Layanan Dukungan Manajemen SDM	1	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	80	

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Out-put (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target
									2021
<b>DMO</b>	DMOO	002-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas	9		Persentase Pegawai Subdit Pengembangan Investasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
		002-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas	10		Persentase Pegawai Subdit Penyiapan Program Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
		003-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	11		Persentase Pegawai Subdit Pengangkutan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
	DMO	003-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	12		Persentase Pegawai Subdit Niaga Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
		003-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	13		Persentase Pegawai Subdit Penyimpanan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
		003-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	14		Persentase Pegawai Subdit Pengolahan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
	DMEW	003-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	15		Persentase Pegawai Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
		004-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	16		Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
		004-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	17		Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
	DME	004-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	18		Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
		004-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	19		Persentase Pegawai Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97
		004-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	20		Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO		Satuan	Target 2021
<b>DMT</b>	DMTL	006-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	21		Percentase Pegawai Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97	
		006-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	22		Percentase Pegawai Subdit Usaha Penunjang Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97	
		006-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	23		Percentase Pegawai Subdit Keselamatan Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97	
		006-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	24		Percentase Pegawai Subdit Keselamatan Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97	
		006-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	25		Percentase Pegawai Subdit Standardisasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97	
		005-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	26		Percentase Pegawai Subdit Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97	
		005-Monitoring Disiplin Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	27		Percentase Pegawai Subdit Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin		%		97	
		013-Pemantauan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal Migas	28		Percentase Pegawai Bagian Umum, Kepengawaian dan Organisasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja		%		88	
		013-Pemantauan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal Migas	29		Percentase Pegawai Bagian Rencana & Laporan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja		%		88	
		013-Pemantauan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal Migas	30		Percentase Pegawai Bagian Keuangan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja		%		88	

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Out-put (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target
									2021
<b>DMB</b>	DMBP	013-Pemantauan Kinerja Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	31		Persentase Pegawai Bagian Hukum Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	88
		008-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas	32		Persentase Pegawai Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	92
		008-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas	22		Persentase Pegawai Subdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	92
		008-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas	34		Persentase Pegawai Subdit Kerja Sama Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	92
		008-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas	35		Persentase Pegawai Subdit Pengembangan Investasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	92
		008-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas	36		Persentase Pegawai Subdit Penyipapan Program Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	92
		010-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	37		Persentase Pegawai Subdit Pengangkutan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	88
<b>DMO</b>	DMOO	010-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	38		Persentase Pegawai Subdit Niaga Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	88
		010-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	39		Persentase Pegawai Subdit Penyimpanan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	88
		010-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	40		Persentase Pegawai Subdit Pengolahan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	88
		010-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	41		Persentase Pegawai Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		%	88

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target
									2021
<b>DME</b>	DMEW	011-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	42		Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		92	
		011-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	43		Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		92	
		011-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	44		Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		92	
		011-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	45		Persentase Pegawai Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		92	
		011-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	46		Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		92	
		009-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Migas	47		Persentase Pegawai Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		91	
		009-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Migas	48		Persentase Pegawai Subdit Usaha Penunjang Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		91	
		009-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Migas	49		Persentase Pegawai Subdit Keselamatan Hllir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		91	
		009-Pemantauan Kinerja Pegawai Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Migas	50		Persentase Pegawai Subdit Keselamatan Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		91	



5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO		Satuan	Target 2021
10	1896 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EAI-Layanan Data dan Informasi	SDM	SDML	002-Evaluasi Layanan Informasi melalui Website	1	Indeks Kepuasan Layanan Bagian Rencana dan Laporan	Indeks	3,25	
11	1896 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EAI-Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	SDM	SDML	001-Layanan Aplikasi dan Statistik Kemigasan	2	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Satker terhadap Ketersediaan Data, Informasi dan Bahan	%	84	
12	1896 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EAN-Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	SDM	SDML	002-Layanan Pelaksanaan Pemanfaatan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	1	Nilai Penguatan Akuntabilitas pada RB	Nilai	6	
			SDMK	SDML	001-Layanan Pelaksanaan Pemanfaatan dan Evaluasi SPIP	2	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3,3	
			SDMK	SDML	011-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Ditjen Migas	1	Percentase Realisasi Anggaran Bagian Keuangan Migas	%	95	
			SDMK	SDML	011-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Ditjen Migas	2	Percentase Realisasi Anggaran Rencana & Laporan	%	95	
			SDMK	SDML	011-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Ditjen Migas	3	Percentase Realisasi Anggaran Bagian Hukum Migas	%	95	
			SDMK	SDML	003-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	4	Percentase Realisasi Anggaran Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi Migas	%	95	
			SDMK	SDML	003-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA	90,27	
			SDMK	SDML	003-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	6	Percentase Penyelesaian Usulan Penghapusan BMN Ditjen Migas	%	100	
			SDMK	SDML	003-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	7	Nilai Pemantauan pada Maturitas SPIP	Nilai	0,5	
			SDMK	SDML	003-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	8	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Bagian Keuangan	%	100	

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Out-put (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target
									2021
<b>DMB</b>	<b>EAN-Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal</b>	DMBP	006-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	9	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas	%	95		
			006-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	10	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Penerimaan PNBP Migas	%	95		
			006-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	11	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Kerja Sama Migas	%	95		
		DMBP	006-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	12	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Pengembangan Investasi Migas	%	95		
			006-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	13	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Penyajian Program Migas	%	95		
			007-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	14	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Pengangkutan Migas	%	95		
		DMO	007-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	15	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Niaga Migas	%	95		
			007-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	16	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Penyimpanan Migas	%	95		
			007-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	17	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Pengolahan Migas	%	95		
		DMO	007-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	18	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar Migas	%	95		
			008-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	19	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	%	95		

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN OUTPUT (IKO)

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Out-put (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target
									2021
			DMEW		008-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	20	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	%	95
			DMEW		008-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	21	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	%	95
			DMEW		008-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	22	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	%	95
			DMEW		008-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	23	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	%	95
			DMTL	<b>DMT</b>	010-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	24	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Ketenikan dan Keselamatan Lingkungan Migas	%	95
			DMTL		010-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	25	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Usaha Penunjang Migas	%	95
			DMTL		010-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	26	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Keselamatan Hilir Migas	%	95
			DMTL		010-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	27	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Keselamatan Hulu Migas	%	95
			DMTL		010-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	28	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Standardisasi Migas	%	95

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Out-put (KRO)	Es II	Es III	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target
									2021
		<b>EAN-Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal</b>	<b>DMI</b>		009-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	29	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas	%	95
					009-Monitoring Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	30	Percentase Realisasi Anggaran Subdit Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Migas	%	95
		<b>EAN-Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal</b>	<b>SDM</b>	<b>SDML</b>	002-Layanan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SAKIP	31	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82,5
13	1896 - Pengelolaan Manajemen Keskretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	<b>FAI-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan</b>	<b>SDM</b>	<b>SDMU</b>	001-Layanan Organisasi Tata Laksana	1	Nilai Evaluasi Keteladanan	Nilai	68
14	1896 - Pengelolaan Manajemen Keskretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	PAH - Peraturan Lainnya [PRIORITAS NASIONAL]	SDM	SDMH	001-Draft Revisi Undang-Undang Migas	1	Draft Revisi Undang-Undang Migas	Draft	1

# BAB VI

## RENCANA AKSI



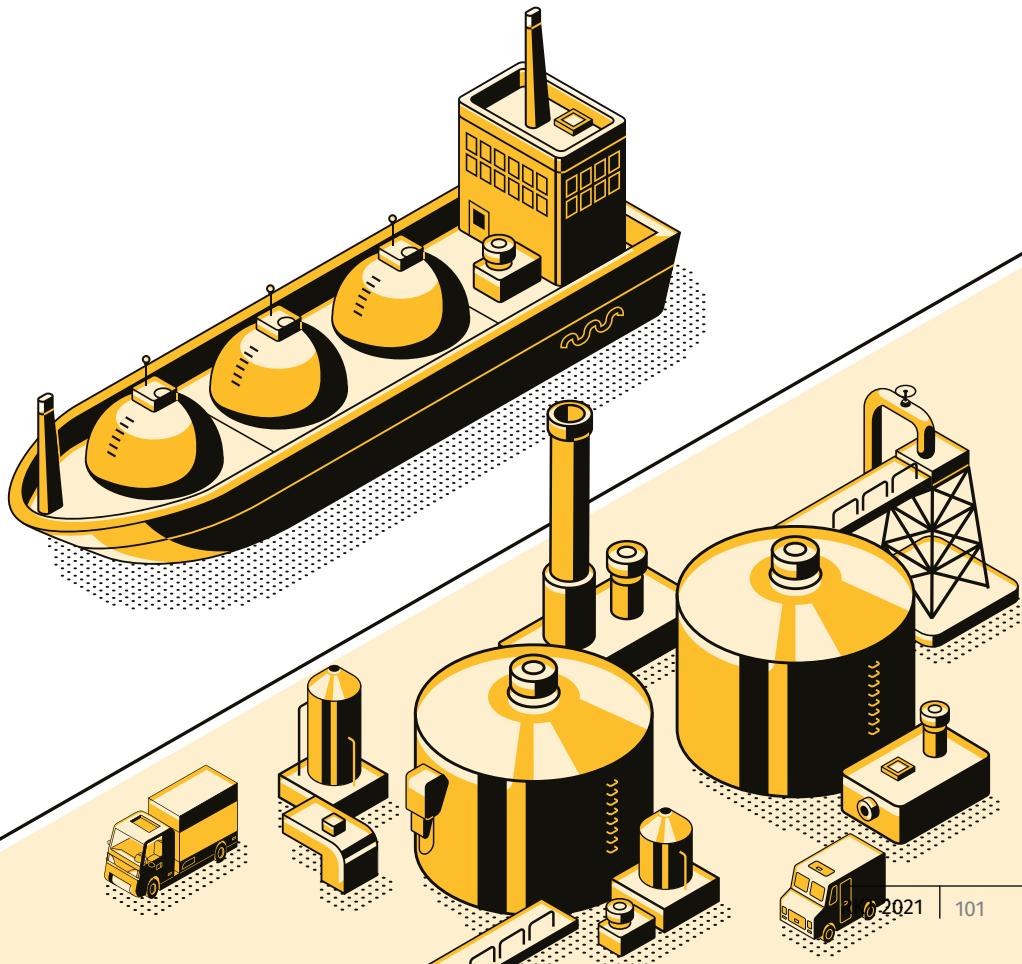
RENCANA  
KERJA TAHUNAN **2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyampaikan bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenpanRB menerapkan pedoman umum evaluasi atas implementasi SAKIP untuk instansi pemerintah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan instansi pemerintah dan berdasarkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan KESDM bahwa Inspektorat Jenderal KESDM merekomendasikan Ditjen Migas untuk melakukan pengembangan system aplikasi yang dapat memantau Rencana Aksi maupun capain Perjanjian Kinerja (PK) secara berkala.

Rencana Aksi dari setiap kegiatan akan memberikan arah dan pedoman pada saat pelaksanaan yang berisi langkah-langkah capaian dalam upaya mewujudkan target kinerja. Rencana aksi tersebut memuat rencana-rencana yang akan dilakukan secara periodik baik bulanan, triwulanan, atau per

semester dengan begitu target suatu kinerja dapat terpantau dengan baik pada saat evaluasi. Aplikasi SIMERAK dari tahun sebelumnya sudah menjadi alat untuk memantau aksi atas kinerja Direktorat Jenderal Migas yang dapat diakses melalui website <http://simerak.migas.esdm.go.id>. Pada Tahun 2021, pengguna aplikasi khususnya yang setara dengan Eselon III diwajibkan mengisi Rencana Aksi per sub kegiatan/sub komponen setiap bulannya, disertai dengan pengisian jumlah target data dukung yang akan disampaikan pada waktu akan dilakukan penilaian oleh evaluator pada akhir triwulan I, II, III dan IV. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah sebagai alat bantu dalam upaya peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja Ditjen Migas secara lebih baik kualitasnya pelaporannya, proses dokumentasinya dan juga peningkatan akses dan penyajian datanya yang sejak tahun 2020 aplikasi ini sudah dapat terhubung dengan aplikasi e-kinerja KESDM. Berikut data yang termuat dalam format rencana aksi atas kinerja yaitu:

1. Sasaran Kegiatan
2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
3. Target
4. Komponen/Sub Komponen
5. Anggaran
6. Rencana Aksi (Januari-Desember)









**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**GEDUNG IBNU SUTOWO**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Kuningan  
Jakarta 12910, Indonesia  
T. +62 21 5268910 (hunting)  
F. +62 21 5269114  
[www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)



[www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas

